

Katalog : 9102059.18



SENSUS EKONOMI 2016

ANALISIS HASIL LISTING

POTENSI EKONOMI PROVINSI LAMPUNG



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI LAMPUNG**

SENSUS EKONOMI 2016

ANALISIS HASIL LISTING

POTENSI EKONOMI PROVINSI LAMPUNG



POTENSI EKONOMI PROVINSI LAMPUNG

ISBN : 978-602-7746-01-5

Katalog BPS : 9102059.18

No. Publikasi : 18550.1712

Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman : xv + 101 Halaman

Naskah:

Analisis Statistik Lintas Sektor

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Provinsi Lampung

Gambar Kulit:

Analisis Statistik Lintas Sektor

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Provinsi Lampung

Diterbitkan oleh:

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Kata Pengantar

Sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) telah melaksanakan Sensus Ekonomi 2016 (SE2016). Pelaksanaan SE2016 dilakukan dalam beberapa tahapan, salah satunya adalah listing atau pendaftaran usaha/perusahaan (SE2016-L). Listing merupakan kegiatan pendataan secara lengkap seluruh kegiatan unit usaha/perusahaan di wilayah Indonesia kecuali Aktivitas Pertanian, Kehutanan & Perikanan (Kategori A), Aktivitas Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (Kategori O) dan Aktivitas Rumah Tangga (Kategori T). Tujuan listing adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai unit usaha/perusahaan beserta karakteristik usahanya. Dengan ketersediaan data yang lengkap mencakup seluruh wilayah Indonesia, maka hasil SE2016-L dapat digunakan untuk mengidentifikasi aktivitas usaha yang potensial baik dalam hal penyerapan tenaga kerja maupun penyediaan lapangan usaha.

Publikasi Potensi Ekonomi Provinsi Lampung 2016 ditujukan untuk memperoleh gambaran dan informasi potensi ekonomi Lampung berdasarkan lapangan usaha. Informasi ini sangat bermanfaat bagi pemerintah dalam mengevaluasi program-program terkait pengembangan potensi wilayah yang sudah dilakukan selama ini.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyukseskan SE2016-L hingga penyusunan publikasi ini dapat terlaksana. Semoga publikasi ini dapat memberikan manfaat kepada segenap penggunanya.

Bandar Lampung, Desember 2017
Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung



Yeane Irmaningrum S. MA



HARAPAN DAN KETERBATASAN

Era supercycle Tiongkok telah berakhir, harga komoditas dunia masih lemah sejak akhir-2014, Tiongkok berupaya mengurangi investasi dan menaikkan konsumsi masyarakat untuk menggapai keseimbangan baru. Konsekuensi yang dihadapi adalah pertumbuhan Naga Asia diproyeksikan terus melambat menjadi 6,4% pada 2018. Abad ini bisa juga dipandang sebagai akhir dari kedigjayaan Amerika melihat perannya yang semakin memudar dalam kancah internasional, berkonsentrasi memperkuat ekonomi dalam negeri negara itu. Uni Eropa semakin gamang setelah ditinggalkan Inggris sebagai salah satu kontributor terbesar untuk anggaran Uni Eropa.

Namun terlepas dari ketidakpastian perekonomian global dan risiko proteksionisme, Sudhir Shetty, Kepala Ekonom Bank Dunia untuk wilayah Asia Timur dan Pasifik tetap optimis melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi negara maju akan tetap kuat, pemulihan harga komoditas akan bertahan moderat, serta pertumbuhan perdagangan global akan pulih.

Demikian pula dengan prospek ekonomi Lampung akan dipengaruhi oleh perkembangan dan tantangan baik nasional dan ekonomi global. Tantangan tersebut dapat menciptakan peluang dan daya saing yang lebih besar bagi perekonomian Lampung. Hal ini didukung oleh salah satu bagian dari Sembilan Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA) 2015-2019 yaitu: peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing dipasar internasional. Sejalan dengan agenda tersebut, pemerintah daerah Provinsi Lampung memerlukan strategi yang tepat yang khususnya mengarah pada pengembangan investasi.

Pemerintah memerlukan basis data yang menyeluruh dan akurat. Secara umum kegiatan SE2016 dilakukan untuk memperoleh data dasar mengenai usaha/perusahaan yang bergerak di berbagai aktivitas usaha di luar usaha pertanian. Data utama yang dikumpulkan mencakup jumlah dan struktur usaha menurut wilayah, lapangan usaha, dan skala usaha. Dengan demikian, data dan informasi statistik dalam SE2016 merupakan modal penting yang dapat dijadikan sebagai salah satu landasan dalam menentukan kebijakan perekonomian.

Pendataan Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) dapat menjadi langkah awal untuk menakar kekuatan perekonomian Indonesia di luar sektor pertanian secara lengkap. Dari

hasil SE2016, diperkirakan jumlah usaha/perusahaan di Lampung tercatat sebanyak 783,29 ribu usaha/perusahaan. Angka ini meningkat dari hasil Sensus Ekonomi 2006 yang sebanyak 641,60 ribu usaha/perusahaan.

Di sisi lain, penguatan sendi perekonomian bumi ruwa jurai juga tidak terlepas dari menguatnya perekonomian pada berbagai aktivitas yang mulai menunjukkan perkembangan cukup pesat. Konstruksi, Transportasi dan Pergudangan, Informasi dan Komunikasi, dan Jasa Perusahaan adalah kategori usaha yang belakangan ini menjadi penguat keberlangsungan pertumbuhan ekonomi Lampung.

Sektor non pertanian yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Provinsi Lampung adalah sektor industri pengolahan yang mencapai 18,83 persen. Namun secara kuantitas, berdasarkan hasil SE2016 aktivitas ekonomi yang paling banyak dijalankan adalah usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil & Sepeda Motor (Kategori G), yang mencapai 57,46 persen. Diikuti, Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (Kategori I) dan Industri Pengolahan (Kategori C) yang merupakan aktivitas ekonomi terbesar kedua dan ketiga, dimana masing-masing mencapai sekitar 12,12 persen dan 11,40 persen terhadap total jumlah usaha/perusahaan.

Percepatan pembangunan wilayah di Lampung perlu didukung oleh pembangunan lokasi industri berupa Kawasan Industri (KI). KI bertujuan untuk mengendalikan tata ruang, meningkatkan upaya industri yang berwawasan lingkungan, mempercepat pertumbuhan industri di daerah, meningkatkan daya saing industri, meningkatkan daya saing investasi, serta memberikan kepastian lokasi dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang terkoordinasi antar sektor terkait.

Nurkse (1953) atau Rosenstein-Rodan (1963) mengargumentasikan bahwa negara harus membangun berbagai industri secara simultan jika ingin mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Tipe pembangunan ini sering disebut sebagai pertumbuhan seimbang pada sisi permintaan, karena pembangunan industri ditentukan oleh permintaan atau pola pengeluaran dari konsumen dan investor. Pertumbuhan seimbang pada sisi penawaran menunjukkan kebutuhan untuk membangun beberapa industri secara bersamaan untuk mencegah kemacetan penawaran.

Berdasarkan hasil SE2016-Listing, Usaha Mikro Kecil (UMK) mendominasi aktivitas ekonomi dengan proporsi sekitar 99,02 persen. Sementara Usaha Menengah Besar (UMB) tercatat sebanyak 7.679 perusahaan. Wilayah yang menjadi sentra perekonomian Lampung memegang peranan penting dalam tumbuh suburnya berbagai aktivitas ekonomi terutama yang menghasilkan jasa-jasa. Selaras dengan sebaran jumlah usaha, peta distribusi tenaga kerja menggambarkan hal yang serupa.

Kategori Usaha G, C dan I merupakan usaha yang menjadi tempat mata pencaharian hampir 70 persen tenaga kerja di Lampung yang mencapai 1,66 juta orang. Sementara kategori usaha lainnya masing-masing hanya memiliki kontribusi di bawah 10 persen. Jika dilihat menurut skala usaha, tenaga kerja yang berkontribusi dalam menghasilkan barang dan jasa pada UMB hanya 13,61 persen. UMB industri pengolahan merupakan aktivitas ekonomi yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Namun, jika dilihat jumlah tenaga kerja per usaha, UMB Kategori Konstruksi yang secara masif menggunakan tenaga kerja, yaitu mencapai 166 orang per usaha/perusahaan. Pada skala UMK, jumlah tenaga kerja nonpertanian tercatat sebanyak 1,43 juta orang (86,39 persen). UMK Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil & Sepeda Motor menyerap tenaga kerja paling banyak dengan penggunaan tenaga kerja lebih dari 664,81 ribu orang, atau delapan kali lipat jumlah tenaga kerja UMB.

Industri Pengolahan, Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum, dan Pendidikan merupakan usaha yang menyerap tenaga kerja tertinggi lainnya. Khusus aktivitas pendidikan, mayoritas usaha diselenggarakan oleh pemerintah dan bersifat nonprofit, yang secara konsep dikategorikan sebagai UMK, sehingga tenaga kerja yang digunakan menambah jumlah tenaga kerja UMK.

UMK diharapkan tidak hanya menjadi tumpuan mata pencaharian penduduk Lampung tetapi juga menjadi sumber aktivitas yang memperkuat sendi perekonomian baik pada tingkat nasional maupun regional. Beberapa penelitian membuktikan bahwa UMK merupakan usaha yang memiliki fleksibilitas dan ketahanan yang tinggi terhadap guncangan ekonomi global. Proteksi ekonomi dan penguatan investasi pada skala usaha mikro kecil harus tetap diperkuat untuk mendukung keberlanjutan perekonomian Lampung. Sementara itu, bagi UMB stimulasi investasi di luar Bandar Lampung sudah selangkahnya diperkuat dengan mengidentifikasi keunggulan komparatif masing-masing wilayah agar kualitas daya saing Lampung tetap terjaga. Konvergensi wilayah merupakan

hal yang masih menjadi permasalahan pembangunan di tanah air termasuk di Provinsi Lampung. Oleh sebab itu pembangunan berbasis sumber daya ekonomi lokal menjadi salah satu fokus pemerintah saat ini. Tidak hanya untuk pemerataan ekonomi, tetapi juga ditujukan untuk pemerataan kualitas sumber daya manusianya.

<https://lampung.bps.go.id>

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Untaian Kata	v
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	
Daftar Lampiran	
BAB 1	1
Potensi Ekonomi Lampung	
• Sumber Daya Manusia yang Melimpah	3
• Perekonomian Lampung Relatif Stabil dalam 5 Tahun Terakhir	6
• Penggerak Utama Perekonomian Lampung	7
BAB 2	11
Tantangan Perekonomian Lampung	
• Kualitas Sumber Daya Manusia yang Masih Rendah	14
• Ketidakmerataan Infrastruktur Antar Wilayah	17
• Kemiskinan	22
• Ketidakstabilan Harga Komoditas Global	26
BAB 3	29
Pengembangan Potensi Ekonomi Lampung Untuk Pemerataan Pembangunan	
• Aktivitas Potensial di Bumi Ruwa Jurai	31
• Potensi Ekonomi Regional	33

	BAB 4	41
Lampung Pintu Gerbang Perdagangan Pulau Sumatera dan Jawa		
• Sektor Perdagangan Memiliki <i>Forward Linkage</i> yang Menonjol		43
	BAB 5	49
Industri Primadona Ekonomi Lampung		
• Agglomerasi Industri		55
	BAB 6	59
Perkembangan Informasi dan Komunikasi di Provinsi Lampung		
• Perkembangan Informasi dan Komunikasi Lampung		61
	BAB 7	67
Menggali Potensi Wisata Lampung		
• Start Up Sektor Akomodasi dan Konsumsi		70
• Dominasi Sektor Informal pada Industri Pariwisata		71
• Potensi Jumlah Wisatawan yang Semakin Membaik		73
	BAB 8	77
Kesimpulan		
• Kesimpulan		79
	Daftar Pustaka	81
	Catatan Teknis	85
	Lampiran	93

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Jumlah Usaha/Perusahaan menurut Skala Usaha dan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2016	5
Tabel 1.2	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi se-Sumatera dan Nasional, 2010-2016	7
Tabel 1.3	Ekspor Komoditas Unggulan di Provinsi Lampung (juta US\$), 2013-2016	10
Tabel 2.1	Persentase Tingkat Pendidikan Orang Tua dan ART yang Tidak Berpartisipasi Sekolah di Provinsi Lampung, 2016	16
Tabel 2.2	Penduduk Bekerja 10 tahun keatas menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2016	17
Tabel 2.3	Standar Pelayanan Minimal Bidang Jalan di Indonesia	22
Tabel 2.4	Perkembangan Penduduk Miskin menurut Klasifikasi Desa/Kota di Provinsi Lampung, 2012-2016	25
Tabel 2.5	Harga KModitas Minyak Sawit dan Karet di Pasar Global, 2010-2016	27
Tabel 3.1	Kontribusi PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi menurut Provinsi di Wilayah Sumatera, 2016	32
Tabel 3.2	Hasil Analisis Shift Share (SS) Lampung dengan Wilayah Referensi Sumatera, 2016	36
Tabel 3.3	Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Lampung dengan Wilayah Referensi Sumatera, 2016	38
Tabel 3.4	Hasil Analisis Overlay Provinsi Lampung dengan Wilayah Referensi Sumatera, 2016	39

Tabel 4.1	Jumlah Usaha/Perusahaan dan Tenaga Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Provinsi Lampung Menurut Kabupaten/Kota, 2016	46
Tabel 5.1	Persentase Usaha Industri berdasarkan Status Badan Usaha di Provinsi Lampung, 2016	55
Tabel 6.1	Jumlah Usaha/Perusahaan dan Tenaga Sektor Informasi dan Komunikasi di Provinsi Lampung Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2016	64
Tabel 7.1	Persentase Usaha Akomodasi dan Konsumsi berdasarkan Status Badan Usaha di Provinsi Lampung, 2016	73
Tabel 7.2	Jumlah Tamu Menginap dan Rata-rata Lama Menginap di Provinsi Lampung, 2014-2016	74

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Jumlah Angkatan Kerja dan Tenaga Kerja di Provinsi Lampung (juta), 2012-2016	3
Gambar 1.2	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Provinsi Lampung, 2012-2016	4
Gambar 1.3	Pertumbuhan PDRB Beberapa Kategori Lapangan Usaha di Provinsi Lampung, 2010-2016	8
Gambar 1.4	Distribusi Usaha/Perusahaan menurut Lapangan Usaha di Provinsi Lampung (persen), 2016	9
Gambar 1.5	Distribusi Usaha/Perusahaan dan Tenaga Kerja Usaha Menengah Besar (UMB) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2016	9
Gambar 2.1	Rasio Panjang Jalan terhadap Luas Wilayah di Provinsi Lampung, 2016	20
Gambar 2.2	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk menurut Wilayah di Provinsi Lampung, 2016	21
Gambar 2.3	Angka Kemiskinan Provinsi Lampung dan Nasional, 2010-2016	23
Gambar 3.1	Hasil Analisis Location Quotient (LQ) Provinsi Lampung dengan Wilayah Referensi Sumatera, 2016	34
Gambar 3.2	Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Lampung dengan Wilayah Referensi Sumatera, 2016	35
Gambar 3.3	Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Lampung dengan Wilayah Referensi Sumatera, 2016	38
Gambar 4.1	Analisis Kuadran terhadap Keterkaitan Antarsektor di Provinsi Lampung	44
Gambar 4.2	Kontribusi Masing-masing Kabupaten/kota dalam menciptakan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Provinsi Lampung (persen), 2016	45

Gambar 4.3	Persentase Usaha/Perusahaan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menurut Kabupaten/kota dan Skala Usaha di Provinsi Lampung, 2016	47
Gambar 4.4	Persentase Usaha/Perusahaan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Provinsi Lampung menurut Kabupaten/Kota dan Umur Perusahaan, 2016	48
Gambar 5.1	Persentase Usaha Industri menurut klasifikasi usaha se-Provinsi Lampung, 2016	52
Gambar 5.2	Persentase Usaha Industri menurut Tenaga Kerja se-Provinsi Lampung, 2016	53
Gambar 5.3	Persentase Usaha industri > 5 tahun dan <5 tahun di Provinsi Lampung, 2016	54
Gambar 6.1	Laju Pertumbuhan Sektor Informasi dan Komunikasi di Provinsi Lampung (persen), 2012-2016	62
Gambar 6.2	Kontribusi Masing-masing Kabupaten/kota dalam menciptakan PDRB Informasi dan Komunikasi di Provinsi Lampung (persen), 2016	63
Gambar 6.3	Persentase Usaha/Perusahaan Informasi dan Komunikasi menurut Kabupaten/kota dan Skala Usaha, 2016	65
Gambar 6.4	Persentase Usaha/Perusahaan Informasi dan Komunikasi di Provinsi Lampung menurut Kabupaten/Kota dan Umur Perusahaan, 2016	66
Gambar 7.1	Distribusi Jumlah Usaha Akomodasi dan Konsumsi se-Provinsi Lampung, 2016	70
Gambar 7.2	Komposisi Perusahaan dibawah 5 tahun dan diatas 5 tahun di Provinsi Lampung, 2016	71

Daftar Lampiran

Lampiran 1.	Banyaknya Usaha/Perusahaan menurut Provinsi se-Sumatera dan Kategori Lapangan Usaha	95
Lampiran 2.	Banyaknya Tenaga Kerja menurut Provinsi se-Sumatera dan Kategori Lapangan Usaha	96
Lampiran 3.	Banyaknya Usaha/Perusahaan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dan Kategori Lapangan Usaha	97
Lampiran 4.	Banyaknya Tenaga Kerja menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dan Kategori Lapangan Usaha	98
Lampiran 5.	PDRB atas dasar harga berlaku menurut Lapangan Usaha di Provinsi Lampung (juta rupiah), 2010-2016	99
Lampiran 6.	PDRB atas dasar harga konstan menurut Lapangan Usaha di Provinsi Lampung (juta rupiah), 2010-2016	100
Lampiran 7.	Distribusi dan Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha di Provinsi Lampung (persen), 2010-2016	101



Potensi Ekonomi LAMPUNG

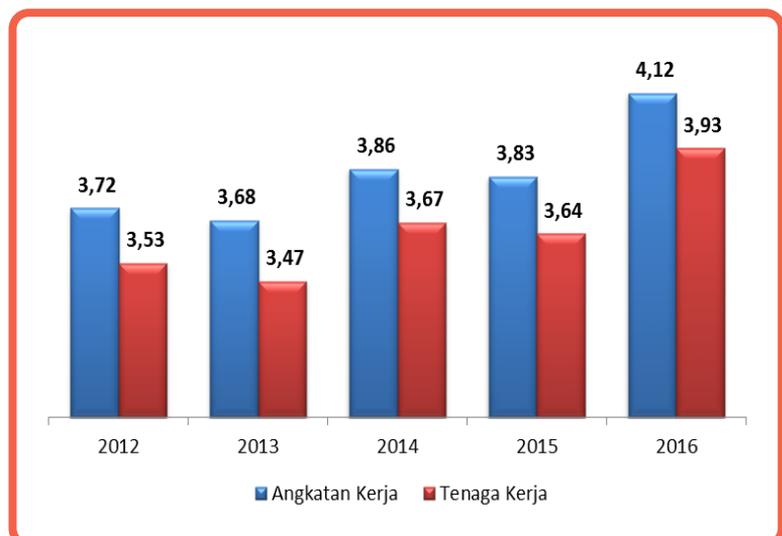
Potensi Ekonomi Lampung

A. Sumber Daya Manusia yang Melimpah

Tenaga Kerja Lampung secara Kuantitas

Potensi kekuatan ekonomi Lampung tidak hanya dari Sumber Daya Alam, namun juga dari Sumber Daya Manusia sebagai faktor produksi. Oleh sebab itu, SDM yang banyak dan berkualitas merupakan investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Sumatera dan sedang mengalami fase bonus demografi, maka Lampung tidak kesulitan dalam penyediaan tenaga kerja. Jumlah penduduk Lampung yang besar juga menjadi kunci sukses bagi peningkatan daya saing Lampung. Dengan dukungan peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan, akan berdampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja dan peningkatan daya saing nasional.

Gambar 1.1 Jumlah Angkatan Kerja dan Tenaga Kerja di Provinsi Lampung (juta), 2012-2016

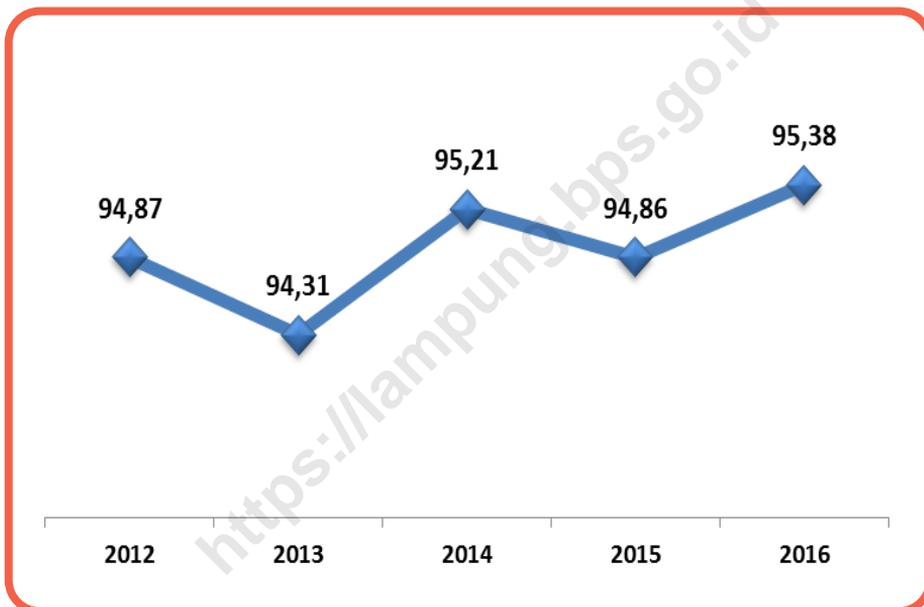


Sumber : BPS, Sakernas 2012-2016

Dari Hasil Pencacahan Lengkap SE2016, sebagian besar usaha/perusahaan di Lampung memiliki skala usaha Mikro dan Kecil, yakni mencapai 99,02 persen dari keseluruhan usaha/perusahaan yang menjadi cakupan SE2016.

Jumlah angkatan kerja yang menggambarkan penawaran tenaga kerja selama lima tahun terakhir cenderung meningkat. Data tahun 2016 menunjukkan bahwa ada sekitar 4,12 juta orang angkatan kerja di Lampung, sebanyak 3,93 juta orang diantaranya tercatat sebagai penduduk yang bekerja. Dengan kata lain, tingkat kesempatan kerja pada tahun 2016 adalah sebesar 95,38 persen. Angka tersebut meningkat dari kondisi tahun sebelumnya seperti terlihat dalam Gambar 1.2.

Gambar 1.2 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Provinsi Lampung, 2012-2016



Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2012-2016

Usaha Mikro Kecil menjadi Sumber Mata Pencaharian Utama

Tenaga kerja Lampung mayoritas berpendidikan Sekolah Dasar. Hal ini akan menimbulkan tingginya pengangguran sebagai akibat dari tidak tertampungnya tenaga profesional dengan keahlian khusus. Namun, di sisi lain tidak tertampungnya pekerja profesional akan menciptakan lapangan pekerjaan di sektor informal.

Kegiatan informal mempunyai karakteristik antara lain: berskala kecil, dimiliki oleh individu atau keluarga, menggunakan teknologi yang sederhana, bersifat padat tenaga kerja, pendidikan dan keahlian tenaga kerja rendah, dan tingkat upah yang relatif rendah pula (Bappenas, 2009). Keberadaan dan kelangsungan kegiatan informal di dalam perekonomian Lampung merupakan realitas yang juga berperan dalam menyediakan peluang kerja bagi angkatan kerja. Kegiatan informal mampu menampung tenaga kerja

Tabel 1.1 Jumlah Usaha/Perusahaan menurut Skala Usaha dan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2016

Kabupaten/Kota (1)	UMK (2)	UMB (3)	Jumlah (4)
[01] LAMPUNG BARAT	24 330	155	24 485
[02] TANGGAMUS	50 574	186	50 760
[03] LAMPUNG SELATAN	82 723	701	83 424
[04] LAMPUNG TIMUR	110 533	511	111 044
[05] LAMPUNG TENGAH	114 081	796	114 877
[06] LAMPUNG UTARA	54 788	363	55 151
[07] WAY KANAN	36 477	121	36 598
[08] TULANGBAWANG	33 626	386	34 012
[09] PESAWARAN	41 251	137	41 388
[10] PRINGSEWU	40 154	361	40 515
[11] MESUJI	16 488	90	16 578
[12] TULANG BAWANG BARAT	21 082	129	21 211
[13] PESISIR BARAT	10 773	68	10 841
[71] BANDAR LAMPUNG	115 356	3 190	118 546
[72] METRO	23 371	485	23 856
LAMPUNG	775 607	7 679	783 286

Sumber : BPS, Hasil SE-2016

dengan keahlian yang kurang. Sebagai dampak positif kegiatan informal adalah berkurangnya pengangguran.

Kegiatan informal biasanya merupakan Usaha Mikro Kecil (UMK) yang memang menjadi andalan penduduk Lampung. Berdasarkan hasil SE2016, jumlah tenaga kerja UMK nonpertanian tercatat sebanyak 1,4 juta orang (86,39 persen). Komposisi ini hampir seragam di setiap wilayah. Sebaran menurut kabupaten/kota menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja UMK mendominasi keseluruhan tenaga kerja di luar sektor pertanian. Namun secara total, sentralisasi tenaga kerja berada di Kota Bandar Lampung (15,38 persen), Lampung Tengah (15,16 persen) dan Lampung Timur (13,93 persen).

UMK Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil & Sepeda Motor menyerap tenaga kerja paling banyak dengan penggunaan tenaga kerja lebih dari 600 ribu orang, atau hampir tiga kali lipat jumlah tenaga kerja UMB. Kategori Pendidikan, Industri Pengolahan, dan Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum merupakan usaha yang menyerap tenaga kerja tertinggi lainnya. Khusus aktivitas pendidikan, mayoritas usaha diselenggarakan oleh pemerintah dan bersifat nonprofit, yang secara konsep dikategorikan sebagai UMK, sehingga tenaga kerja yang digunakan menambah jumlah tenaga kerja UMK.

UMK tidak hanya merupakan tumpuan mata pencaharian penduduk Lampung tetapi juga sumber aktivitas yang memperkuat sendi perekonomian baik pada tingkat nasional maupun regional. Beberapa penelitian membuktikan bahwa UMK merupakan usaha yang memiliki fleksibilitas dan ketahanan yang tinggi terhadap guncangan ekonomi global. Proteksi ekonomi dan penguatan investasi pada skala usaha mikro kecil harus tetap diperkuat untuk mendukung keberlanjutan perekonomian bangsa.

Sementara itu, bagi UMB stimulasi investasi di luar Kota Bandar Lampung sudah selayaknya diperkuat dengan mengidentifikasi keunggulan komparatif masing-masing wilayah agar kualitas daya saing Lampung tetap terjaga. Hal ini ditengarai dengan tingginya jumlah tenaga kerja di Bandar Lampung yang mencapai hampir 40 persen keseluruhan tenaga kerja nonpertanian di Lampung. Disparitas wilayah merupakan hal yang masih menjadi permasalahan pembangunan di Lampung, oleh sebab itu pembangunan berbasis sumber daya ekonomi lokal menjadi salah satu fokus pemerintah saat ini. Tidak hanya untuk pemerataan ekonomi, tetapi juga ditujukan untuk pemerataan kualitas sumber daya manusia.

B. Perekonomian Lampung Relatif Stabil dalam 5 Tahun Terakhir

Krisis global yang terjadi setelah periode 1997-1998 mempengaruhi perekonomian dunia, tidak terkecuali Lampung. Krisis ekonomi yang terjadi tahun 2008 berawal dari krisis keuangan Amerika Serikat yang umum disebut istilah *subprime mortgage*. Kemudian dilanjutkan dengan krisis global yang terjadi pada tahun 2011 di kawasan Eropa (*Eurozone Sovereign debt crisis*).

Namun karena faktor fundamental ekonomi Lampung cukup kuat setelah menghadapi krisis pada tahun 1997-1998, imbas krisis tersebut tidak terlalu signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Lampung. Disamping itu, keberadaan UMK yang mendominasi perekonomian turut andil menjaga stabilitas ekonomi Lampung.

Tabel 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi se-Sumatera dan Nasional, 2010-2016

Wilayah	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	2,74	3.28	3.85	2.61	1.55	-0.73	3.31
Sumatera Utara	6,42	6.66	6.45	6.07	5.23	5.10	5.18
Sumatera Barat	5,94	6.34	6.31	6.08	5.88	5.52	5.26
Riau	4,21	5.57	3.76	2.48	2.71	0.22	2.23
Jambi	7,35	7.86	7.03	6.84	7.36	4.20	4.37
Sumatera Selatan	5,63	6.36	6.83	5.31	4.79	4.42	5.03
Bengkulu	6,10	6.85	6.83	6.07	5.48	5.13	5.30
Lampung	5,88	6.56	6.44	5.77	5.08	5.13	5.15
Kep, Bangka Belitung	5,99	6.90	5.50	5.20	4.67	4.08	4.11
Kepulauan Riau	7,19	6.96	7.63	7.21	6.60	6.01	5.03
Nasional	6,22	6,17	6,03	5,56	5,01	4,88	5,02

Sumber : BPS RI

Beberapa daerah seperti Aceh, Riau dan Jambi mengalami fluktuasi pertumbuhan ekonomi yang tajam, sementara perekonomian Lampung fluktuasinya tidak setajam daerah-daerah tersebut.

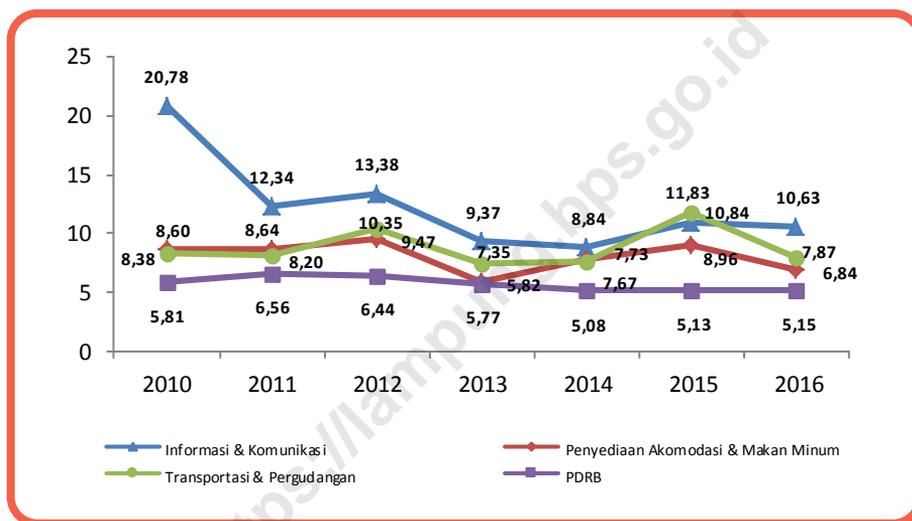
C. Penggerak Utama Perekonomian Lampung

Dari hasil SE2016, jumlah usaha/perusahaan di Lampung tercatat sebanyak 783.286 usaha/perusahaan. Angka ini meningkat dari hasil Sensus Ekonomi 2006 yang sebanyak 632.623 usaha/perusahaan. Perkembangan jumlah penduduk dan tumbuhnya usaha modern seperti bisnis *online* turut memberikan andil meningkatnya aktivitas ekonomi di Lampung beberapa tahun belakangan.

Di sisi lain, penguatan sendi perekonomian bangsa juga tidak terlepas dari menguatnya perekonomian pada berbagai aktivitas yang mulai menunjukkan perkembangan cukup pesat. Kategori Informasi dan Komunikasi, Transportasi dan Pergudangan, dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum adalah beberapa kategori

usaha yang belakangan ini menjadi penguat keberlangsungan pertumbuhan ekonomi Lampung. Capaian pertumbuhan ekonomi kategori tersebut cukup tinggi dan selalu diatas pertumbuhan ekonomi total yang rata-rata mencapai 5,71 persen pertahun pada periode 2010-2016. Hal ini merupakan sebuah prestasi yang cukup menggembirakan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Gambar 1.3 Pertumbuhan PDRB Beberapa Kategori Lapangan Usaha di Provinsi Lampung, 2010-2016

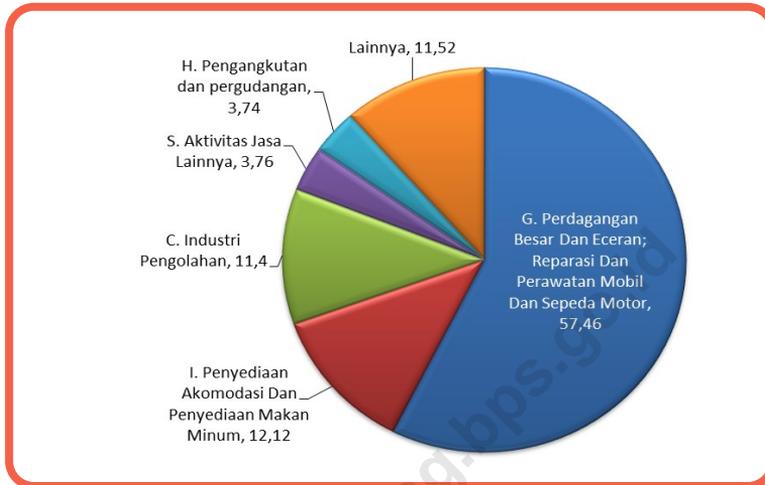


Sumber : BPS, Publikasi PDRB Provinsi Lampung menurut Lapangan Usaha

Namun demikian, secara kuantitas, aktivitas ekonomi yang paling banyak dijalankan adalah usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil & Sepeda Motor (Kategori G), berjumlah 57,46 persen. Hal ini tak dapat dipungkiri bahwa di Lampung terlihat banyaknya usaha perdagangan yang beraneka ragam dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Merebaknya perdagangan online tak lepas dari jumlah pengguna telepon seluler yang terus meningkat. Berdasarkan data Susenas, terjadi peningkatan penduduk yang menguasai ponsel pada tahun 2016, yaitu mencapai 55 persen. Begitu pula dengan penggunaan komputer dan akses internet (termasuk Facebook, Twitter, BBM, Whatsapp). Terjadi kenaikan pada tahun 2016 menjadi 11 persen untuk pengguna komputer dan 16 persen penduduk yang mengakses internet.

Kemudian, berdasarkan hasil Listing SE2016 kategori Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (I) dan Industri Pengolahan (C) merupakan aktivitas ekonomi terbesar kedua dan ketiga yang dijalankan oleh masing-masing 12,12 dan 11,40 persen usaha/perusahaan di Lampung.

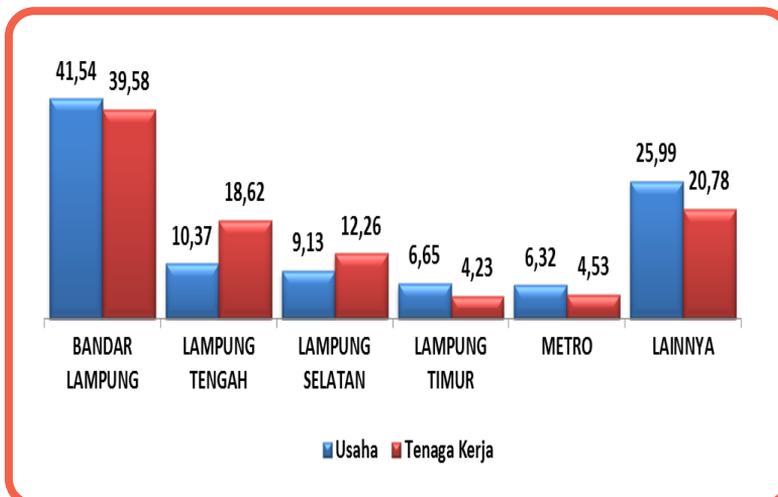
Gambar 1.4 Distribusi Usaha/Perusahaan menurut Lapangan Usaha di Provinsi Lampung (persen),2016



Sumber : Hasil SE2016-Listing

Usaha Mikro dan Kecil di Lampung mendominasi perekonomian dengan proporsi sekitar 99 persen. Sementara itu, Usaha Menengah Besar (UMB) hanya sebanyak 7.679 perusahaan, dan terkonsentrasi di Kota Bandar Lampung (41,65 persen). Wilayah yang menjadi sentra perekonomian Lampung ini memegang peranan penting dalam tumbuh suburnya berbagai aktivitas ekonomi terutama yang menghasilkan jasa-jasa.

Gambar 1.5 Distribusi Usaha/Perusahaan dan Tenaga Kerja Usaha Menengah Besar (UMB) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung (persen), 2016



Sumber : Hasil SE2016-Listing

Secara lebih rinci, keunggulan ekonomi Lampung dapat tercermin dari produk atau komoditi yang mampu menguasai pasar global. Produk-produk unggulan ekspor Lampung antara lain Lemak & Minyak Hewan/Nabati; Kopi, Teh, Rempah-rempah; Batu Bara; Olahan dari Buah-Buahan/Sayuran; serta Bubur Kayu/Pulp.

**Tabel 1.3 Ekspor Komoditas Unggulan
di Provinsi Lampung (juta US\$), 2013-2016**

Golongan Barang	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lemak & Minyak Hewan/Nabati	1.395,92	1.694,53	1.405,27	1.207,35
Kopi, Teh, Rempah-rempah	881,12	576,57	898,51	670,26
Batu Bara	418,48	373,88	386,26	293,47
Olahan dari Buah-Buahan/ Sayuran	155,34	186,81	224,07	182,67
Bubur Kayu/Pulp	174,52	163,66	198,35	164,69
Daging dan Ikan Olahan	190,52	213,09	152,50	146,28
Karet dan Barang dari Karet	112,52	141,87	107,67	116,74

Sumber : BPS Provinsi Lampung

bab
2



Tantangan Perekonomian Lampung

Tantangan Kedepan

Perekonomian Provinsi Provinsi Lampung sangat bergantung pada komoditas pertanian. Hal ini tercermin dari kontribusi komoditas pertanian terhadap pembentukan PDRB Provinsi Lampung yang mencapai 30 persen dalam kurun waktu 2010-2016.

Negara-negara Asia menghadapi berbagai tantangan besar perekonomian di masa depan. Tantangan–tantangan itu diantaranya adalah jebakan pendapatan kelas menengah, situasi tata kelola dan institusi ekonomi, population aging (orang tua) semakin banyak, ketimpangan terus tinggi, dan pengembangan sektor keuangan. "Jika mampu atasi ini, ekonomi Asia akan cemerlang," kata Direktur IMF Asia Changyong Rhee.

Beberapa hasil penelitian mengungkapkan bahwa modal manusia (Human Capital) merupakan salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Dalam paradigma pembangunan manusia, pendapatan menjadi suatu alat untuk menguasai sumber daya agar dapat terwujud suatu kehidupan yang layak.

Selanjutnya tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) baru saja digulirkan dan Indonesia berkomitmen penuh untuk melaksanakan dan menyukseskannya. Badan Pusat Statistik sebagai instansi yang berperan penting dalam monitoring dan evaluasi SDGs berupaya untuk menyediakan data dan informasi bagi indikator SDGs. Data dan Indikator SDGs memiliki 17 Goals, 169 target, 241 indikator, sehingga BPS dan Pemerintah memerlukan lebih banyak indikator yang dapat diaplikasikan secara universal untuk menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, lingkungan, sosial dan ekonomi, dengan agenda 2030 sebagai target.

Ada Beberapa tantangan ke depan yang akan dihadapi Provinsi Lampung yaitu: masih Kualitas sumber daya yang masih rendah; belum memadai derajat pendidikan dan kesehatan, Ketimpangan Infrastruktur dan harga komoditas perkebunan yang belum stabil, masih tingginya kelompok masyarakat miskin dengan akses terbatas terhadap sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Namun Tantangan terbesar dalam proses transformasi ekonomi wilayah adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) .

A. Kualitas Sumber Daya Manusia yang Masih Rendah

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu unsur yang paling berperan dalam pembangunan ekonomi. SDM berperan sebagai agent of development, pelaksana dan penentu keberhasilan pembangunan. Disamping itu SDM merupakan faktor produksi dalam proses pembangunan ekonomi, sehingga sangat menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Smith (2003) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja saling berkaitan dan menguatkan. Namun, untuk menciptakan ekonomi yang kuat, tenaga kerja yang berkualitas adalah syarat yang harus dipenuhi. Ekonomi yang kuat karena ditunjang oleh produktivitas yang tinggi.

Menurut Todaro and Smith (2015) pendidikan merupakan salah satu pilar yang mendorong peningkatan produktivitas. Hal ini didasarkan tujuan pendidikan yang membuka ruang terjadinya akumulasi pengetahuan dan keterampilan (World Bank, 2010).

Sesungguhnya, pendidikan meningkatkan produktivitas secara tidak langsung. SDM yang berpendidikan menggunakan sumberdaya lain lebih efisien sehingga menjadi lebih produktif. Dengan pendidikan pula proses produksi menjadi lebih baik. Kesimpulannya, peningkatan pendidikan akan meningkatkan efisiensi seluruh faktor produksi.

Hal inilah yang membedakan antara negara kaya dan negara miskin. Negara miskin tidak mampu meningkatkan produktivitas karena investasi SDM yang rendah dan tidak mampu mengadopsi teknologi yang baru. Disamping itu, hal ini terjadi karena tabungan domestik dan sumber daya keuangan eksternal yang minim (UNDP, 1996). Dengan demikian kualitas SDM yang tercermin dari pendidikan akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan.

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian/keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari tingkat pendidikan yang ditamatkannya. Seseorang yang menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikannya yang tinggi dapat mempunyai pengetahuan yang luas serta keterampilan/keahlian yang tinggi. Dengan semakin meningkatnya keterampilan/ keahlian akan semakin mudah mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan juga dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah.

Sesuai dengan amanah UUD 1945 pasal 31 ayat 4 bahwa pemerintah daerah wajib menyisihkan minimal 20 % dari APBN untuk Pendidikan dan minimal 20 % dari APBD.

Dibeberapa daerah sudah memberlakukan biaya pendidikan secara gratis untuk sekolah dasar negeri dan sekolah menengah pertama negeri tetapi kenyataannya masih terdapat biaya-biaya yang harus ditanggung oleh orang tua murid, terlebih pembiayaan untuk sekolah-sekolah yang dikelola pihak swasta. Ini harus mendapat perhatian serius dari pemerintah agar program wajib belajar 9 tahun dapat terealisasi dengan mulus di provinsi ini.

Padahal, sejatinya negara harus menyediakan kesempatan yang sangat luas bagi setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dasarnya. Aksebilitas yang seluas-luas tersebut sejalan dengan bagaimana upaya mempercepat pembangunan manusia dan pembangunan ekonomi di suatu negara. Akan tetapi, hal ini dapat terwujud bergantung pada sejauh mana kemampuan keuangan. Dalam konsepsi Nawa Cita Presiden terpilih, salah satu program prioritas pemerintah kedepan adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Peningkatan kualitas tersebut salah satunya diwujudkan melalui Program Indonesia Pintar melalui wajib belajar 12 tahun bebas pungutan. Pemerintah Indonesia kini berencana memperluas skema beasiswa untuk anak-anak keluarga miskin. Bagaimana upaya perluasan wajib belajar sembilan tahun di Provinsi Lampung? Dapatkan Provinsi Lampung memperluas beasiswa dengan dibantu posko anak putus sekolah sampai level RT, diharapkan setiap warga yang putus sekolah dapat melaporkan ke ketua RT masing-masing seperti di Kutai Kalimantan Timur. Dalam beberapa tahun ke depan pembangunan pendidikan nasional masih dihadapkan pada berbagai tantangan serius, terutama dalam upaya meningkatkan kinerja yang mencakup :

1. Pemerataan dan perluasan akses,
2. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing,
3. Penataan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik,
4. Peningkatan pembiayaan.

Namun, kenyataannya tahun 2016 masih ada sekitar 3,28 persen penduduk Lampung usia 15 tahun ke atas yang tidak dapat membaca dan menulis huruf latin artinya bahwa dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas terdapat sekitar 4 orang yang tidak dapat membaca dan menulis huruf latin. Rata-rata lama sekolah (25+) penduduk Lampung di tahun 2016 sebesar 7,63 yang artinya penduduk Lampung usia 25 tahun ke atas rata-rata menikmati pendidikan sampai kelas 2 SMP atau putus sekolah di kelas 3 SMP.

Hal ini berarti, program wajib belajar 9 tahun belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Tingkat pendidikan orangtua menjadi salah satu penyebab pola pikir masyarakat yang kurang mendukung kemajuan pendidikan. Terjadinya kasus putus sekolah, terkadang disebabkan hanya karena orangtua berpandangan bahwa bersekolah

tinggi itu tidak berguna. Masyarakat yang pendidikannya rendah masih ada yang memiliki kecenderungan menyekolahkan anaknya seadanya atau sesuai dengan pendidikan orangtua. Pada kelompok umur 16-18 tahun, angka putus sekolah untuk orangtua yang tidak sekolah atau tidak tamat SD sebesar 44,02 persen, paling besar dibandingkan tingkat pendidikan orangtua lainnya. Untuk orangtua yang berpendidikan SD, didapatkan angka putus sekolah sebesar 33,56 persen.

Tabel 2.1 Persentase Tingkat Pendidikan Orang Tua dan ART yang Tidak Berpartisipasi Sekolah di Provinsi Lampung, 2016

Pendidikan Orang Tua (1)	ART tidak berpartisipasi sekolah		
	7-12 (2)	13-15 (3)	16-18 (4)
Tidak Sekolah/ Belum tamat SD	0,21	11,81	44,02
SD	0,20	7,22	33,56
SLTP	1,02	0,00	31,85
SLTA	0,41	3,01	15,71

Sumber : BPS, Susenas 2016

Angka putus sekolah ini semakin menurun jika pendidikan orangtua semakin tinggi. Berdasarkan tabel diatas ada hubungan berbanding terbalik antara tingkat pendidikan orangtua dengan angka putus sekolah. Semakin tinggi tingkat pendidikan orangtua, angka putus sekolah semakin rendah.

Selanjutnya gambaran lain kualitas SDM Provinsi Lampung khususnya tenaga kerja masih harus mendapatkan perhatian yang lebih intens. Hasil Sakernas 2016 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tenaga kerja Provinsi Lampung masih terbelang rendah. Tabel disamping memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan pekerja kondisi Februari 2016 masih rendah, yaitu sebesar 45,99 persen tenaga kerja memiliki tingkat pendidikan SD ke bawah. Diikuti dengan tingkat pendidikan SMP dan sederajat yang sebesar 22,85 persen.

Tenaga kerja dengan kualitas pendidikan yang rendah, akan berdampak pada rendahnya daya tawar tenaga kerja Indonesia. Hal tersebut akan menyebabkan tidak tertampungnya mereka pada lapangan pekerjaan yang lebih profesional yang mensyaratkan keahlian dan kualifikasi tinggi. Dengan diterapkannya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) mulai tahun 2016, tenaga kerja Indonesia akan sulit bersaing dalam dunia kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Oleh sebab itu pendidikan dan

pelatihan dipandang sebagai suatu investasi di bidang sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Selanjutnya jumlah angkatan kerja yang besar tidak terserap oleh pertumbuhan ekonomi atau terserap tetapi hanya di sektor informal yang tidak produktif. Peranan perempuan dalam pasar kerja meningkat tetapi dengan kualitas pekerjaan yang buruk (sektor informal, pekerja keluarga tak dibayar). Tabungan belum terwujud karena rendahnya pendapatan. Pengangguran muncul karena rendahnya tingkat pertumbuhan permintaan terhadap tenaga kerja di sektor industri modern dan tingkat pertumbuhan yang cepat dari persediaan tenaga kerja kota yang berasal dari desa (Todaro,1995). Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Tabel 2.2 Penduduk Bekerja 10 tahun keatas menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2016

Pendidikan	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
≤ SD	45,04	47,64	45,99
SLTP	24,57	19,85	22,85
SLTA	24,36	21,22	23,21
Diploma / Universitas	6,03	11,29	7,94

Sumber : BPS, Sakernas 2016

B. Ketidakmerataan Infrastruktur Antar Wilayah

Infrastruktur merupakan elemen struktural ekonomi yang memfasilitasi arus barang dan jasa antara produsen dan konsumen (Pearce, 1996). Dalam hubungannya dengan pembangunan ekonomi, infrastruktur merupakan elemen yang sangat dibutuhkan (Hirschman, 1958).

Bank Dunia (1994) membagi infrastruktur kedalam 3 jenis yaitu infrastruktur ekonomi, sosial, dan administrasi/institusi. Infrastruktur ekonomi meliputi public utilities (telekomunikasi, air minum, sanitasi, dangas); public works (bendungan, saluran irigasi, dan drainase), serta transportasi (jalan, kereta api, pelabuhan, dan lapangan terbang). Sementara infrastruktur sosial meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, dan rekreasi.

Sedangkan infrastruktur administrasi/institusi seperti penegakan hukum, kontrol administrasi, dan lain sebagainya. Ketersediaan infrastuktur juga mempercepat pemerataan pembangunan melalui pembangunan infrastruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan antar wilayah sehingga mendorong investasi yang baru, lapangan kerja baru dan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Republik Indonesia sesungguhnya telah mengadopsi kebijakan infrastruktur. Hal ini tercermin dari pertimbangan Keputusan Presiden Nomor 81 tahun 2001 tentang Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastuktur yang menyatakan bahwa dalam rangka pemulihan ekonomi, diperlukan langkah-langkah secara lebih terkordinasi guna mendorong percepatan pembangunan infrastuktur dengan mengutamakan investasi swasta dalam maupun luar negeri. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut Pemerintah RI melalui Keputusan Presiden Nomor 81 tahun 2001 membentuk Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastuktur (KKPPI). Pada pokoknya tujuan pembentukan KKPPI adalah dalam rangka membuat infrastuktur termasuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi peningkatan investasi swasta maupun kerjasama antara Pemerintah dengan swasta dalam pembangunan infrastuktur. Kemudian Pemerintah RI menyempurnakan landasan yuridis bagi KKPPI melalui Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2005 dan dipertegas oleh Peraturan Presiden RI Nomor 67 tahun 2005 yang di dalam pertimbangannya menyatakan bahwa ketersediaan inrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam pergaulan global.

Namun pada kenyataannya Penyediaan infrastruktur di Indonesia masih belum optimal dan sepenuhnya melayani kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan jaringan jalan eksisting, pemenuhan air bersih, irigasi, maupun infrastruktur lainnya. Dalam kajian terbarunya, World Economic Forum(WEF) mengungkapkan bahwa tingkat daya saing Indonesia masih tertinggal terutama pada pilar infrastruktur, pilar kesiapan teknologi, dan pilar inovasi. Penilaian WEF ini menunjukkan bahwa kendala struktural yang dihadapi Indonesia (the most binding constraints) masih di seputar ketiga pilar tersebut dalam delapan tahun terakhir. Secara lebih spesifik, kendala pilar infrastruktur antara lain bersumber dari masih rendahnya kualitas jalan, pelabuhan, bandara, kereta hingga kualitas pasokan listrik

Tantangan yang dihadapi tidak diimbangi dengan kemampuan Pemerintah dalam menyediakan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur, bahkan dari tahun ke tahun semakin menurun kemampuan keuangan pemerintah misalnya, saat ini alokasi infrastruktur dalam postur APBN dinilai masih dibawah standar yang diharapkan. Alokasi anggaran infrastruktur dewasa ini baru mencapai kurang lebih 2 persen terhadap PDB

(2012). Sedangkan menurut beberapa pakar dan Asian Development Bank (ADB), anggaran infrastruktur yang ideal untuk pembangunan infrastruktur Indonesia adalah minimal 5 persen dari PDB. Tentu masalah pendanaan bukan hal yang mudah, karena ruang fiskal pemerintah juga semakin sempit. Semakin kurangnya pengeluaran terhadap infrastruktur membuat dengan sendirinya cakupan dan mutu pelayanan infrastruktur menjadi rendah

Untuk mencapai angka pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen, diperlukan pembiayaan investasi infrastruktur sebesar 5 persen dari total PDB, sedangkan Negara-negara lainnya Filipina sebesar 3,6 persen, Vietnam 9,9 persen, India dan China berada masing masing berada diatas 10 persen. Pengeluaran pemerintah di subsektor ini terus menurun, pada era 1990 an sebesar 5 – 7 persen. Namun paska krisis hanya menjadi 2 sampai 3 persen. (Kementrian PU,2009). Laju investasi infrastruktur di Indonesia meningkat pesat sebesar 43,6 persen dalam dolar AS menjadi 2,5 persen dari PDB tahun 2015. Demikian halnya dengan persentase pengeluaran *infrastruktur* terhadap Anggaran belanja negara terus *meningkat* dalam tiga *tahun* terakhir, yaitu sebesar 14,2 persen pada *tahun* 2015, meningkat menjadi 15,2 persen *tahun* 2016 dan 18,6 persen pada 2017.

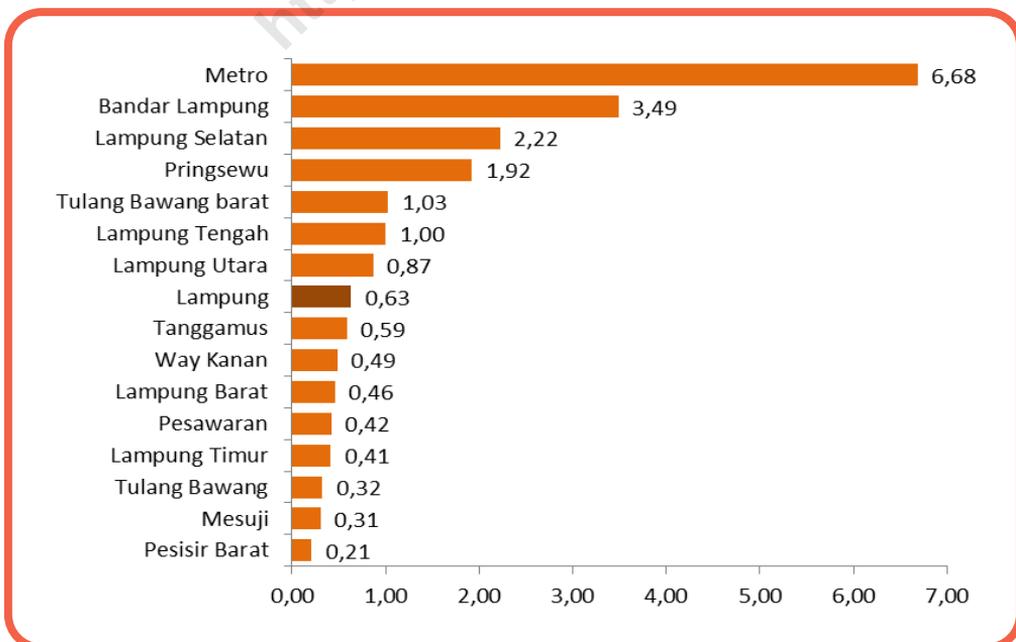
Pembangunan infrastruktur di Provinsi Lampung tahun 2015 masih diprioritaskan untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur jalan provinsi. Pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan di Lampung secara langsung ikut mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, dan menjadi daya tarik bagi investor untuk berinvestasi di daerah ini. Beberapa proyek pembangunan infrastruktur yang sudah dimulai dan terus dipercepat, yakni penyelesaian jalan tol Sumatera dari Bakauheni (Lampung Selatan) hingga Terbanggi Besar (Lampung Tengah), yang ditargetkan rampung pada 2017. Pembangunan jaringan infrastruktur gas bumi terintegrasi di Provinsi Lampung yang dilintasi pipa gas Sumatera Selatan ke Jawa Barat oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN), dan perbaikan jaringan irigasi, juga mendukung perkembangan ekonomi dan investasi di Lampung. Saat ini tengah dilakukan perbaikan jaringan irigasi dan perbaikan DAM Sukoharjo I dan Segala Mider di Lampung Tengah dan DAM Sukaraja Tiga di Lampung Timur untuk meningkatkan produksi pertanian.

Ketersediaan infrastruktur yang baik di suatu negara akan mendorong peningkatan produktivitas output maupun tenaga kerja. Peningkatan produktivitas output karena menunjang proses produksi dan distribusi yang kan berdampak pada peningkatan output. Sementara infrastruktur sosial akan meningkatkan modal manusia, sehingga akan berdampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja. Sayangnya, ketersediaan infrastruktur di Indonesia tidak cukup merata antar wilayah. Di luar pulau Jawa, ketersediaan infrastruktur masih sangat terbatas. Salah satu Indikator untuk mengukur

Kesenjangan Infrastruktur Antarwilayah. Rasio Kerapatan Jalan Rasio kerapatan jalan ditunjukkan oleh rasio panjang jalan (Km) terhadap Luaswilayah (Km²). Rasio kerapatan jalan memiliki makna tinggi rendahnya aksesibilitas antardaerah, yaitu semakin besar angka rasio kerapatan jalan maka kemudahan dalam menjangkau antardaerah yang dihubungkan oleh infrastruktur jalan disuatu wilayah semakin besar, dan sebaliknya Pembangunan infrastruktur yang baik akan menjamin efisiensi, memperlancar pergerakan barang dan jasa, dan meningkatkan nilai tambah perekonomian.

Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu faktor pendorong produktivitas daerah. Keberadaan infratsruktur seperti jalan raya dan jembatan akan mampu membuka akses bagi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas ekonomi. Sayangnya ketersediaan jalan antar wilayah masih belum merata. Sebagai contoh. Di wilayah Lampung, rasio panjang jalan terhadap luas wilayah hanya 0,63. Artinya di setiap 1 km² luas wilayah hanya terdapat 0,63 km panjang jalan. Namun, jika dibandingkan antar kabupaten kota se-provinsi Lampung, Kota metro memiliki rasio tertinggi dengan rata-rata panjang jalannya 6,68 km pada setiap 1 km² Wilayah dengan kategori sangat tinggi. Disusul oleh kota Bandar Lampung sebesar 3,49 km² pada posisi kedua. Sebaliknya Pesisir Barat masih sebesar 0,21 km dengan kategori sangat rendah. Terbatasnya jalan yang tersedia tentunya akan menghambat proses pembangunan. Dengan demikian,

Gambar 2.1 Rasio Panjang Jalan terhadap Luas Wilayah di Provinsi Lampung, 2016

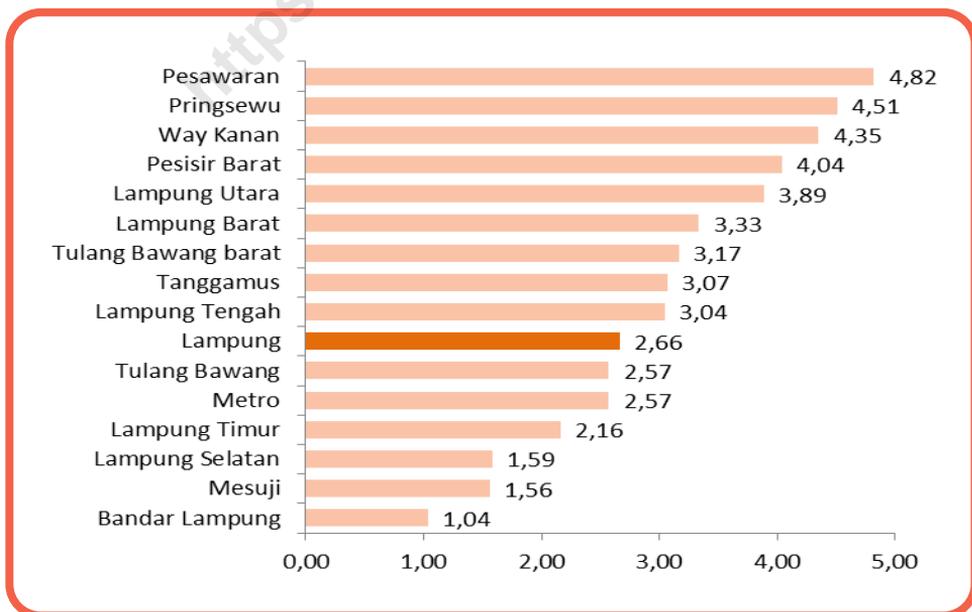


Sumber : BPS Provinsi Lampung

Provinsi Lampung memiliki dilayani oleh jaringan jalan negara sepanjang 1.382 km dan jalan provinsi 2.085 km dan jalan kabupaten/kota sebesar 17.864 km. Pembangunan ekonomi membutuhkan dukungan sarana transportasi dan ketersediaan jaringan listrik yang memadai. Secara kualitas, kondisi jalan di Provinsi Lampung cukup baik Berdasarkan jenis permukaannya, sebagian besar (58 persen) sudah beraspal, namun masih terdapat kondisi jalan rusak ringan dan belum beraspal. Kondisi jalan yang buruk akan meningkatkan waktu tempuh perjalanan dan membengkakkan biaya distribusi barang antar daerah, yang pada gilirannya menghambat perekonomian daerah.

Selanjutnya indikator lainnya adalah nilai rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk diperoleh dengan membagi jumlah panjang jalan (km) dengan 1000 penduduk suatu wilayah dengan. Panjang jalan yang diperhitungkan adalah jalan nasional (belum termasuk jalan tol), jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota. Rasio ini memiliki arti km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani 1000 penduduk. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi pula jumlah masyarakat yang dilayani.

Gambar 2.2 Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk menurut Wilayah di Provinsi Lampung, 2016



Sumber : BPS Provinsi Lampung

Gambar diatas menunjukkan di Provinsi Lampung memiliki akses 2,66 km jalan yang melayani 1000 penduduk. Pesawaran memiliki akses 4,82 km di posisi teratas

diikuti oleh Kabupaten pringsewu diperingkat kedua dengan akses jalan sebesar 4,52 km. Kedua Kabupaten tersebut memiliki indek mobilitas yang tinggi diatas 2. Sementara itu, Bandar Lampung diposisi terendah dengan 1,04 km jalan dengan kategori akses mobilitas sedang. hampir 40% dalam kondisi buruk (rusak dan rusak berat) karena sangat kurangnya pemeliharaan yang baik, terutama di jaringan jalan kabupaten.

Pemerintah daerah perlu melakukan perbaikan infrastruktur perdesaan sehingga memudahkan distribusi bahan makanan dan melakukan peningkatan investasi sektor pertanian dalam jangka panjang. Semakin kurangnya pengeluaran terhadap infrastruktur membuat cakupan dan mutu pelayanan infrastruktur menjadi rendah. Contohnya, dalam hal jalan.

Tabel 2.3 Standar Pelayanan Minimal Bidang Jalan di Indonesia

NO	Aspek	Ukuran	Nilai
1	Aspek Aksesibilitas	Panjang Jalan /Luas (km/km ²)	Sangat tinggi > 5 Tinggi > 1,5 Sedang >0,5 Rendah >0,15 Sangat rendah >0,05
2	Aspek Mobilitas	Panjang jalan/100 penduduk	Sangat tinggi > 5 Tinggi > 2 Sedang > 1 Rendah > 0,5 Sangat rendah > 0,2

Sumber : Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2001

C. Kemiskinan

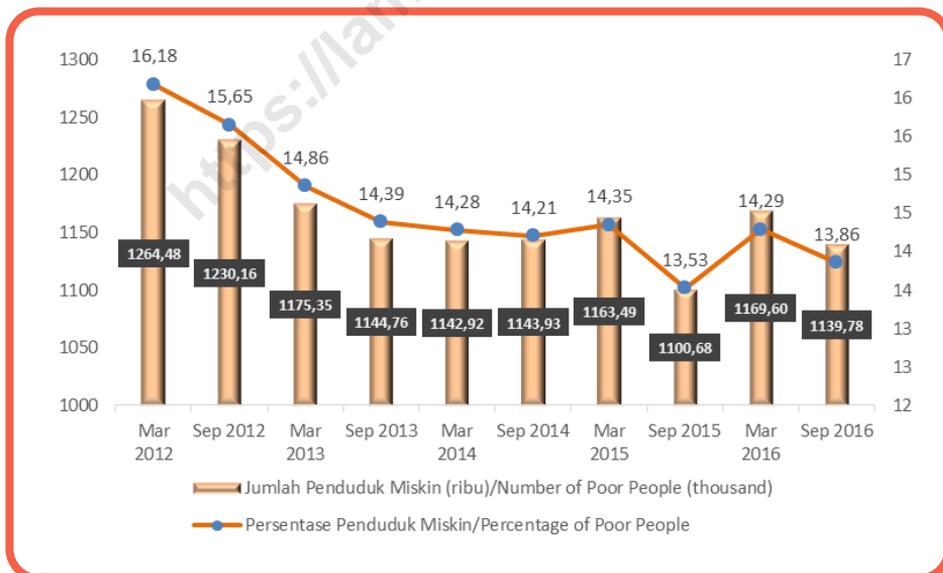
Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di manapun. Mayoritas masyarakat miskin merupakan kalangan yang aktif dalam kegiatan ekonomi, oleh karena itu selain membutuhkan bantuan pemberdayaan lain, masyarakat miskin juga membutuhkan akses kepada sumber permodalan usaha. Dalam kaitan ini, lembaga keuangan yang ada di Indonesia yang diakui oleh peraturan yang ada adalah bank perkreditan rakyat (BPR), koperasi simpan pinjam, koperasi kredit (credit union), dan kredit mikro yang dilayani oleh bank-bank besar yang membuka layanan kredit mikro.

Masyarakat miskin dengan keterbatasan modal dan kurangnya keterampilan maupun pengetahuan, hanya memiliki sedikit pilihan pekerjaan yang layak dan terbatasnya

peluang untuk mengembangkan usaha. Namun, masyarakat miskin mempunyai persepsi bahwa mengurus kredit mikro ke perbankan sulit, selain itu keengganan untuk berinteraksi dengan perbankan dipengaruhi oleh dugaan adanya biaya administrasi perbankan yang besar (BAPPENAS, 2011).

Dengan kata lain, mengupayakan pembiayaan bagi usaha usaha mikro akan bermuara pada pengentasan kemiskinan. Pendanaan bagi usaha mikromerupakan salah satu aspek yang menjadi substansi regulasi dan kebijakan dalam menumbuhkan iklim usaha yaitu kondisi yang diupayakan pemerintah dan pemerintah Daerah untuk memberdayakan usaha mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya Sejak Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM hingga lahirnya UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM memberikan landasan yang kokoh bagi keberadaan usaha mikro.

Gambar 2.3 Angka Kemiskinan Provinsi Lampung dan Nasional, 2010-2016



Sumber : BPS Provinsi Lampung

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi dengan angka kemiskinan diatas rata-rata nasional. Berdasarkan Gambar 2.3 terlihat bahwa angka kemiskinan Provinsi Lampung kembali mengalami kenaikan pada Maret 2015. Dari hasil survei terakhir diketahui angka kemiskinan Lampung sebesar 14,35 persen atau sebanyak 1.163,49 ribu jiwa (lihat Tabel 1). Data September 2014 angka kemiskinan Provinsi Lampung masih

14,21 persen atau 1.143,93 ribu jiwa. Dengan kata lain selama periode September 2014–Maret 2015 telah terjadi penambahan jumlah penduduk miskin sekitar 19,56 ribu jiwa atau 0,14 persen. Angka kemiskinan Lampung Maret 2015 ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional yang sebesar 11,22 persen.

Tren penurunan angka kemiskinan yang dialami Provinsi Lampung sejak 2010, tidak terjadi sejak September 2014. Kenaikan ini juga terjadi pada tingkat nasional bahkan kenaikan angka kemiskinan tingkat nasional lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan angka kemiskinan Provinsi Lampung. Dengan demikian, gap antara angka kemiskinan nasional dengan Lampung menjadi semakin sempit.

Tingkat kemiskinan juga dibedakan menjadi dua berdasarkan klasifikasi desa/kota (municipality). Yang menjadi pembeda adalah garis kemiskinan antara kota dan desa. Perbedaan tersebut didasarkan pada tingkat kecukupan untuk hidup layak yang berbeda antara kota dan desa. Penduduk miskin di Provinsi Lampung terkonsentrasi di pedesaan yang jumlahnya hampir empat kali lipat dibandingkan penduduk miskin di perkotaan. Pada September 2016 jumlah penduduk miskin di pedesaan mencapai 912,34 ribu jiwa. Jumlah ini menurun jika dibandingkan Maret 2016 yang mencapai 936,21 ribu jiwa. Masih banyaknya jumlah penduduk miskin pedesaan disebabkan oleh kurangnya infrastruktur yang mendukung, serta masalah keterbatasan akses penduduk terhadap sarana dan prasarana transportasi, kesehatan, dan pendidikan (Haryanto, 2012). Hal lain yang juga menyebabkan tingginya kemiskinan di wilayah pedesaan dibandingkan perkotaan adalah karena garis kemiskinannya yang cukup tinggi seiring dengan inflasi yang sulit dikendalikan. Masyarakat pedesaan banyak mengkonsumsi barang yang diproduksi di kota.

Kenaikan tingkat kemiskinan selama periode September 2014-Maret 2015, lebih signifikan terjadi di daerah urban (perkotaan) yang bertambah 0,26 persen (9,1 ribu jiwa), sedangkan di daerah rural (pedesaan) hanya mengalami kenaikan 0,11 persen (10,5 ribu jiwa). Berarti pada periode ini penurunan tingkat kesejahteraan penduduk miskin lebih cepat terjadi di perkotaan dibanding di pedesaan.

Kenaikan angka kemiskinan pada periode September 2014-Maret 2015 disebabkan oleh meningkatnya garis kemiskinan. Karena pada hakikatnya penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita/bulan dibawah garis kemiskinan. Semakin tinggi garis kemiskinan, semakin banyak penduduk miskin jika tidak diikuti peningkatan pendapatan.

Selama periode September 2014–Maret 2015, garis kemiskinan naik Rp. 19.174,- atau 6,01 persen, yaitu dari Rp 318.822,- per kapita per bulan pada September 2014 menjadi Rp 337.996,- per kapita per bulan pada Maret 2015. Terjadinya peningkatan nilai Garis

Tabel 2.4 Perkembangan Penduduk Miskin menurut Klasifikasi Desa/Kota di Provinsi Lampung, 2012-2016

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Ko- ta+Desa	Kota	Desa	Ko- ta+Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2012 (Maret)	241,10	1 023,39	1 264,48	12,00	17,63	16,18
2012 (Sept)	240,11	990,05	1 230,16	11,88	16,96	15,65
2013 (Maret)	235,47	939,88	1 175,35	11,59	15,99	14,86
2013 (Sept)	224,81	919,95	1 144,76	10,89	15,62	14,39
2014 (Maret)	230,63	912,28	1 142,92	11,08	15,41	14,28
2014 (Sept)	224,21	919,73	1 143, 93	10,68	15,46	14,21
2015 (Maret)	233,27	930,22	1 163, 49	10,94	15,56	14,35
2015 (Sept)	197,94	902,74	1 100,68	9,25	15,05	13,53
2016 (Maret)	233,39	936,21	1 169,60	10,53	15,69	14,29
2016 (Sept)	227,44	912,34	1 139,78	10,15	15,24	13,86

Sumber : BPS Provinsi Lampung

Kemiskinan, mengakibatkan baik di perkotaan maupun perdesaan tingkat kemiskinannya meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pendapatan sebagian penduduk miskin khususnya mereka yang berada di sekitar garis kemiskinan tidak mampu mengimbangi tingginya kenaikan harga.

Strategi pengentasan kemiskinan di perdesaan harus dikaitkan dengan peningkatan usaha ekonomi produktif dan perbaikan infrastruktur pertanian di pedesaan. Adanya pembinaan usaha tani padat modal yang digalang oleh suatu koperasi nasional di bawah pengelolaan negara diharapkan dapat memperbaiki sistem kelembagaan sehingga akan menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Keberadaan usaha mikro, merupakan fakta semangat jiwa kewirausahaan sejati di kalangan rakyat yang bisa menjadi perintis pembaharuan. Menyadari realitas ini, memfokuskan pengembangan ekonomi rakyat terutama pada usaha mikro merupakan hal yang sangat strategis.

Di belahan dunia lain, yaitu Bangladesh, turut tumbuh model keuangan mikro yang lain. Diprakarsai oleh Muhammad Yunus pada 1976, Grameen Bank (GB) lahir dengan semangat bahwa kredit mikro dapat menjadi jalan keluar dari kemiskinan dan kredit merupakan bagian dari hak asasi manusia. Inovasi model GB berupa pinjaman sekuensial dalam kelompok membuka peluang bagi kalangan miskin yang belum produktif secara ekonomi (very poor). Selain itu, GB memfokuskan layanannya hanya untuk kalangan miskin (termasuk sangat miskin).

Konsentrasi pada pengentasan kemiskinan melalui instrumen kredit yang perlu disertai dengan layanan tambahan, seperti pelatihan terkait baca tulis, menghitung, kesehatan gizi, keluarga berencana dan sebagainya. Lewat pendekatan ini, pemerintah dan pihak donor membiayai kredit untuk orang miskin, dengan bunga di bawah suku bunga pasar. Tujuannya adalah menjangkau orang miskin, terutama yang miskin “papa”, untuk membantu keluar dari lembah kemiskinan serta memberdayakan mereka (contoh: Grameen Bank of Bangladesh).

D. Ketidakstabilan Harga Komoditas Global

Kekayaan dan keanekaragaman komoditas Lampung merupakan aset yang sangat fundamental bagi sang bumi ruwa jurai. Sejak abad ke-19 dan ke-20 kopi dan lada Lampung menjadi primadona dunia, walaupun dengan minus infrastruktur dan kondisi sebagai tanah jajahan kolonial belanda. Beberapa komoditas Lampung mampu bersaing dan menguasai sebagian pasar dunia sehingga menjadi primadona penghasil devisa bagi Lampung. Sayangnya komoditas unggulan ekspor Lampung tersebut sebagian besar merupakan komoditas primer seperti kelapa sawit, karet, kopi, udang, dan produk-produk pertambangan. Saat ini menurut kajian percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Lampung (P3EL) Produksi tapioka sebesar 60 persen dari produksi nasional, disusul oleh produksi gula memberikan kontribusi sebesar 37,70 persen dari total gula nasional. Selanjutnya lada nasional sebanyak 27,56 persen disumbangkan dari Lampung. Bahkan nanas kalengan merupakan 26 persen pemasok kebutuhan dunia. Sebagai salah satu negara utama yang memproduksi dan mengekspor komoditas-komoditas primer, Provinsi Lampung menghadapi tantangan yaitu terjadinya volatilitas harga di pasar komoditas global.

Komoditas primer yang menjadi tulang punggung ekspor Lampung seperti kelapa sawit, karet, dan kopi mengalami penurunan harga yang tajam setelah krisis global yang terjadi pada tahun 2008-2009. Karet mengalami penurunan harga paling tajam selama periode 2010-2016, yaitu hampir 75 persen (Tabel 2.2). Indonesia merupakan penghasil karet alam terbesar kedua di dunia, sekitar 28 persen kebutuhan dunia setelah Thailand. Karet merupakan salah satu komoditas perkebunan unggulan Provinsi Lampung. Pulau Sumatera adalah produsen karet terbesar di Indonesia, menghasilkan sekitar 65 persen dari karet nasional. Dengan penurunan harga ini tentunya akan memukul petani Indonesia khususnya Lampung. Berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2013, terdapat sekitar 2,9 juta rumah tangga yang mengusahakan karet di Indonesia. Jika harga di tingkat global rendah, maka secara tidak langsung akan berdampak pada penurunan pendapatan rumah tangga petani karet yang jumlahnya cukup banyak.

Selain komoditas karet, kelapa sawit juga mengalami penurunan harga yang cukup tajam. Produksi minyak sawit dunia didominasi oleh Indonesia dan Malaysia yang secara total menghasilkan hampir 90 persen dari total produksi minyak sawit dunia. Indonesia sendiri merupakan produsen sekaligus eksportir minyak sawit yang terbesar. Dampak dari penurunan ini cukup jelas. Petani kelapa sawit menjerit karena harga panen kelapa sawit tidak seimbang dengan harga pemeliharaannya. Hal ini akan berdampak langsung pada kesejahteraan petani yang mengusahakannya. Di lain pihak dalam jangka panjang prospek minyak kelapa sawit ini cukup baik seiring perkembangan populasi dunia. Hal ini menyebabkan peningkatan konsumsi produk-produk dengan bahan baku minyak sawit, contohnya produk makanan dan kosmetik. Selain itu pemakaian biofuel sebagai pengganti minyak bumi dan batubara di berbagai negara sedang digalakkan. Terkait dengan hal tersebut, Indonesia harus mengembangkan industri hilir berbahan baku kelapa sawit, sehingga volatilitas harga kelapa sawit di pasaran dunia tidak berdampak signifikan.

Tabel 2.5 Harga Komoditas Minyak Sawit, dan Karet di Pasar Global, 2010-2016

Komoditas	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Minyak kelapa sawit (\$/mt)	776,00	849,00	693,00	568,00	566,00	-49,0
Minyak inti sawit (\$/mt)	762,00	827,00	968,00	847,00	894,00	-45,0
Karet RSS3 Singapura (b/c/mt)	2,90	2,51	1,60	1,25	1,23	-71,5
Karet TSR20 Singapura (c/kg)	3,11	3,04	1,48	1,17	1,08	-74,5

Sumber : BPS Provinsi Lampung

Sebagai negara dengan pengekspor bahan komoditas mentah, pemerintah sudah terfokus untuk merangsang pembentukan industri pengolahan hilir. Hal ini untuk menghindari perekonomian Indonesia yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas primer di pasar global. Selain itu juga ditujukan untuk memberikan nilai tambah pada produk-produk ekspor Indonesia. Pertumbuhan sektor industri akan mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan penduduk Indonesia.



Pengembangan Potensi Ekonomi Lampung Untuk Pemerataan Pembangunan

Pengembangan Potensi Ekonomi Lampung Untuk Pemerataan Pembangunan

A. Aktivitas Potensial di Bumi Ruwa Jurai

Ketimpangan ekonomi antar wilayah menjadi latar belakang mengapa optimalisasi potensi kewilayahan menarik untuk dianalisis. Saat ini faktanya menunjukkan bahwa Pulau Jawa mendominasi kegiatan ekonomi Indonesia dengan kontribusi yang mencapai 60 persen PDB Indonesia. Namun demikian, sesungguhnya pulau lain memiliki potensi ekonomi dari sisi lain. Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita di Pulau lain ternyata memiliki capaian yang cukup menggembirakan. Oleh sebab itu, penggalian potensi ekonomi luar Jawa sangat penting untuk dilakukan.

Identifikasi potensi ekonomi yang dimiliki sebuah daerah tentu tidak bisa dilakukan tanpa dasar ilmiah. Analisis ekonomi yang bersifat kewilayahan merupakan suatu metode analisis yang dapat dilakukan untuk mengetahui potensi suatu sektor ekonomi suatu daerah dibandingkan dengan potensi sektor tersebut pada suatu daerah referensi. Hasil analisis tersebut dapat menunjukkan sektor-sektor ekonomi apa saja yang memiliki perkembangan dan kondisi lebih baik bila dibandingkan dengan sektor ekonomi yang sama pada daerah referensi. Hal ini berarti analisis ekonomi yang bersifat kewilayahan dapat mengungkapkan sektor ekonomi apa saja yang memiliki keunggulan komparatif. Dengan demikian, sektor ekonomi potensial tersebut dapat lebih dikembangkan secara intensif sehingga dapat membantu mendongkrak perekonomian daerah.

Lampung merupakan salah satu provinsi di pulau Sumatera yang menjadi pintu gerbang dari ujung selatan pulau Sumatera. Lampung yang memiliki 15 kabupaten/kota tersebar dengan kondisi geografis yang berbeda dan potensi ekonomi yang berbeda pula. Pemerataan pembangunan antar wilayah di Lampung merupakan arah kebijakan utama pembangunan nasional. Oleh karena itu, menggali potensi

Terdapat 4 (empat) lapangan usaha di Provinsi Lampung yang memiliki keunggulan komparatif dari sisi penyerapan tenaga kerja bila dibandingkan dengan wilayah Sumatera Kategori tersebut antara lain: Industri Pengolahan (C); Perdagangan (G); Informasi dan Komunikasi (J) dan Jasa Lainnya (R,S,U);

ekonomi masing-masing wilayah harus dilakukan untuk optimalisasi pembangunan berbasis potensi yang dimiliki. Dengan demikian, harapannya konvergensi ekonomi dapat dicapai terutama dengan mendorong transformasi dan akselerasi.

Diantara provinsi di pulau Sumatera, Lampung bukanlah provinsi yang paling tinggi share PDRB-nya terhadap Sumatera. Akan tetapi, Lampung memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, urutan ketiga tertinggi se Sumatera. Hal ini membuktikan bahwa ekonomi Lampung masih cukup baik dan juga mengindikasikan konvergensi ekonomi yang disebabkan Lampung berusaha untuk mencapai level yang relatif sebanding terhadap provinsi-provinsi lainnya.

Tabel 3.1 Kontribusi PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera, 2016

Provinsi (1)	Share PDRB (%) (2)	Pertumbuhan Ekonomi (%) (3)
Aceh	4,92	3,31
Sumatera Utara	22,53	5,18
Sumatera Barat	7,02	5,26
Riau	24,47	2,23
Jambi	6,16	4,37
Sumatera Selatan	12,74	5,03
Bengkulu	1,99	5,30
Lampung	10,08	5,15
Kep. Bangka Belitung	2,34	4,11
Kep. Riau	7,77	5,03

Sumber : BPS, PDRB Menurut Lapangan Usaha 2016

Dalam publikasi ini, sektor ekonomi yang unggulan dan potensial di Provinsi Lampung akan diidentifikasi dengan mengambil wilayah referensi Sumatera, baik dari segi tenaga kerja maupun PDRB.

B. Potensi Ekonomi Regional

Penentuan potensi ekonomi yang dimiliki suatu daerah tentu tidak dapat dilakukan tanpa dasar. Adapun dalam publikasi ini akan diidentifikasi kategori atau lapangan usaha yang potensial di Provinsi Lampung dengan menggunakan 4 (empat) alat analisis, yakni Analisis *Location Quotient* (LQ); Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP); Analisis *Shift Share*; dan Analisis Tipologi Klassen. Hasil dari 4 alat analisis tersebut kemudian akan disandingkan (*overlay*) sehingga dapat menunjukkan lapangan usaha apa yang potensial di Provinsi Lampung.

1. Analisis *Location Quotient* (LQ)

Analisis *Location Quotient* digunakan untuk menunjukkan besar kecilnya peranan kategori perekonomian suatu wilayah dengan membandingkan banyaknya tenaga kerja pada kategori yang sama pada wilayah yang lebih besar. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi kategori ekonomi unggulan berdasarkan penyerapan tenaga kerja pada suatu wilayah. Selain itu, analisis ini juga dipergunakan untuk mengidentifikasi keunggulan komparatif (*comparative advantage*) suatu wilayah.

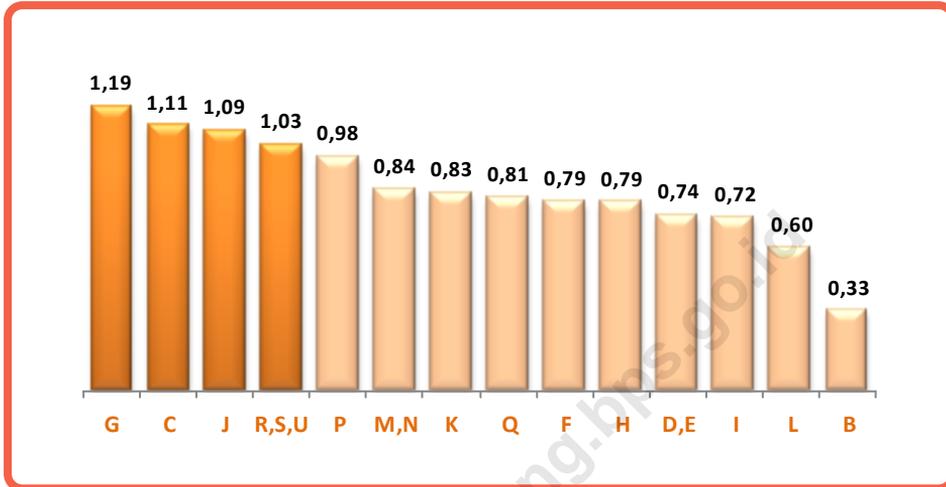
Nilai penghitungan Analisis LQ dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Jika nilai $LQ > 1$, berarti kategori tersebut merupakan kategori unggulan dalam menyerap tenaga kerja dibandingkan dengan kategori yang sama di suatu wilayah.
- Jika nilai $LQ < 1$, berarti kategori tersebut bukan merupakan kategori unggulan karena penyerapan tenaga kerjanya lebih rendah dibandingkan dengan penyerapan tenaga kerja dari kategori yang sama di suatu wilayah.

Kesimpulan yang dapat ditarik bahwa bila nilai $LQ > 1$, kategori tersebut merupakan kategori unggulan atau memiliki keunggulan komparatif di wilayah Sumatera. Dengan kata lain, kategori tersebut potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian daerah. Sebaliknya, bila suatu kategori memiliki nilai $LQ < 1$, berarti kategori tersebut bukan merupakan kategori unggulan di daerah dan kurang potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian daerah.

Adapun hasil olah analisis LQ dengan wilayah referensi Sumatera tersajikan dalam Gambar 3.1.

Gambar 3.1 Hasil Analisis Location Quotient (LQ) Provinsi Lampung Dengan Wilayah Referensi Sumatera, 2016



Sumber : BPS, Hasil Olah Pencacahan Lengkap SE2016

Hasil Analisis LQ yang dilakukan menunjukkan bahwa Provinsi Lampung memiliki 4 (empat) kategori yang memiliki keunggulan komparatif di wilayah Sumatera. Kategori tersebut antara lain: Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor (G); Industri Pengolahan (C); Informasi dan Komunikasi (J) dan Jasa Lainnya (R,S,U).

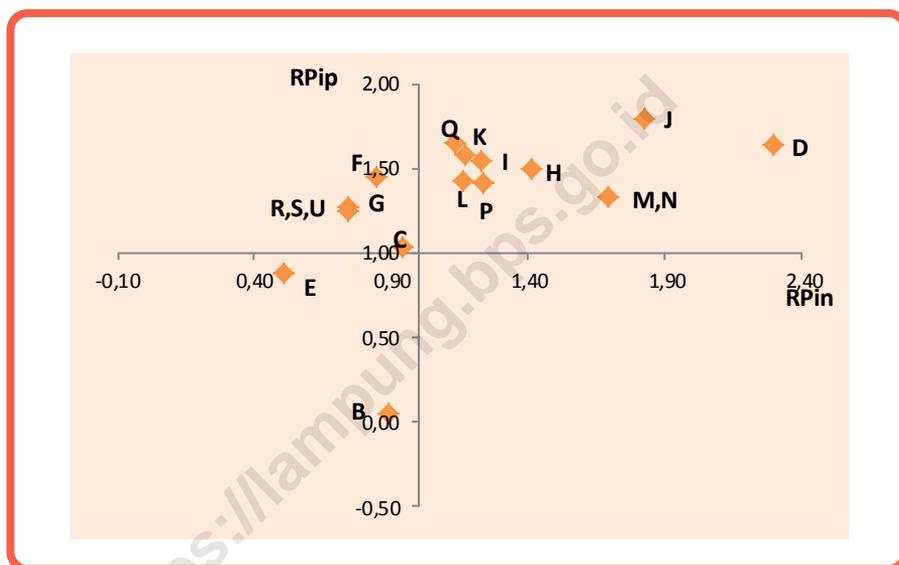
2. Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

Selain alat analisis LQ, alat analisis lain dirasakan penting dipergunakan untuk mengidentifikasi kategori ekonomi potensial suatu daerah. Hal ini mengacu kepada rekomendasi Yusuf (1999), yang menganjurkan untuk menggunakan lebih dari satu alat analisis dalam mengidentifikasi kategori ekonomi potensial di suatu wilayah. Analisis berikut yang digunakan untuk mengidentifikasi kategori ekonomi yang potensial adalah analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP). Metode identifikasi dari analisis ini ialah berdasarkan kriteria pertumbuhan PDRB.

Tujuan analisis MRP adalah untuk mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan PDRB (*competitive advantage*). Analisis MRP akan menyandingkan Rasio Pertumbuhan suatu kategori pada wilayah analisis dengan Rasio Pertumbuhan suatu kategori pada wilayah reference.

Penyandingan nilai Rasio Pertumbuhan tersebut ditampilkan dalam kuadran-kuadran. Adapun hasil olah analisis MRP dengan wilayah referensi Sumatera tersajikan dalam Gambar 3.2.

Gambar 3.2 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Lampung dengan Wilayah Referensi Sumatera, 2016



Sumber : BPS, Hasil Olah PDRB menurut Lapangan Usaha 2016

Hasil Analisis MRP yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat 9 (sembilan) kategori lapangan usaha yang memiliki nilai $RPip > 1$ dan $RPin > 1$ (Kuadran 1). Dengan kata lain, terdapat 9 kategori lapangan usaha yang memiliki unggul dari sisi pertumbuhan ekonominya, baik di level Provinsi Lampung maupun level wilayah Sumatera. Kategori tersebut antara lain: Pengadaan Listrik dan Gas (D); Jasa Perusahaan (M,N); Aktivitas Keuangan dan Asuransi (K); Transportasi dan Pergudangan (H); Informasi dan Komunikasi (J); Real Estat (L); Jasa Pendidikan (P); Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial (Q); dan Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (I).

Selain itu, terdapat 4 (empat) kategori lapangan usaha dengan nilai $RPip > 1$, tetapi $RPin < 1$ (Kuadran 2) yakni Jasa Lainnya (R,S,U); Konstruksi (F); Perdagangan (G); dan Industri Pengolahan (C). Dari hasil ini, keempat kategori tersebut diindikasikan memiliki keunggulan komparatif di level Provinsi Lampung, tetapi tidak secara global di level wilayah Sumatera.

Terdapat 2 (dua) kategori lapangan usaha yang tidak memiliki keunggulan komparatif, baik khusus di level Provinsi Lampung maupun di level wilayah

Sumatera. Lapangan usaha tersebut adalah Pertambangan (B) dan Pengelolaan Air (E). Hal ini ditandai oleh nilai RPP maupun RPN yang kurang dari 1.

III. Analisis Shift Share (SS)

Shift Share merupakan salah satu teknik kuantitatif untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi suatu wilayah terhadap struktur ekonomi wilayah administratif yang lebih luas sebagai referensi, dalam hal ini Provinsi Lampung dibandingkan dengan Pulau Sumatera.

Adapun hasil Analisis *Shift Share* di Provinsi Lampung dengan wilayah referensi Sumatera tersaji dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Hasil Analisis Shift Share (SS) Provinsi Lampung Dengan Wilayah Referensi Sumatera, 2016

Kategori	N_{ij} (Regional Share/RS)	M_{ij} (Proportional Shift Share/PS)	C_{ij} (Differential Shift/DS)	D_{ij} (Shift Share/SS)	Kesimpulan dari tanda M_{ij}/PS dan C_{ij}/DS		
B	303.498.907,45	(289.781.586,94)	357.922.588,36	+	371.639.908,87		
C	882.865.984,74	30.915.666,71	+	231.339.022,73	+	1.145.120.674,18	+
D	4.420.744,55	2.801.554,27	+	6.777.197,70	+	13.999.496,53	+
E	5.733.814,09	(707.441,10)	(1.037.844,54)		3.988.528,45		
F	462.873.024,66	205.905.260,99	+	(128.314.349,11)		540.463.936,54	
G	627.808.037,44	169.174.177,14	+	(151.623.035,03)		645.359.179,54	
H	216.675.450,21	106.202.766,75	+	99.068.069,92	+	421.946.286,89	+
I	60.842.863,37	32.792.592,01	+	9.460.437,67	+	103.095.893,05	+
J	170.800.802,81	134.526.963,41	+	124.385.973,20	+	429.713.739,42	+
K	98.650.327,57	57.192.274,47	+	2.743.919,88	+	158.586.521,92	+
L	142.006.452,16	60.841.399,53	+	23.914.200,77	+	226.762.052,47	+
MN	5.652.105,81	1.855.859,04	+	5.674.597,18	+	13.182.562,03	+
P	123.640.566,30	50.611.279,87	+	35.917.691,92	+	210.169.538,09	+
Q	44.968.378,34	29.060.948,23	+	(3.663.424,23)		70.365.902,34	
RSU	45.347.042,50	11.250.017,39	+	(10.087.782,23)		46.509.277,66	

Sumber : BPS, Hasil Olah PDRB menurut Lapangan Usaha 2016

Terlihat dari Tabel 3.2, terdapat 9 (sembilan) kategori lapangan usaha yang memiliki M_{ij} dan C_{ij} yang bernilai positif atau $M_{ij} > 0$ dan $C_{ij} > 0$. Hasil ini

mengindikasikan bahwa 9 kategori tersebut merupakan kategori dengan pertumbuhan sangat pesat. Dengan demikian, berdasarkan Analisis Shift Share (SS), terdapat 9 kategori yang memiliki potensi untuk dikembangkan di Provinsi Lampung. Adapun kesembilan kategori tersebut diantaranya adalah Industri Pengolahan (C), Pengelolaan Listrik dan Gas (D), Transportasi dan Pergudangan (H); Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (I); Informasi dan Komunikasi (J); Aktivitas Keuangan dan Asuransi (K); Real Estat (L); Jasa Perusahaan (M,N) dan Jasa Pendidikan (P).

IV. Analisis Tipologi Klassen

Tipologi Klassen mendasarkan pengelompokan suatu sektor, subsektor, usaha atau komoditi daerah dengan cara membandingkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan pertumbuhan ekonomi daerah (atau nasional) yang menjadi acuan dan membandingkan pangsa sektor, subsektor, usaha, atau komoditi suatu daerah dengan nilai rata-ratanya di tingkat yang lebih tinggi (daerah acuan atau nasional).

Tipologi Klassen dengan pendekatan sektoral menghasilkan 4 klasifikasi sektor dengan karakteristik yang berbeda, yaitu :

- Sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat (Kuadran I).
- Sektor maju tapi tertekan (Kuadran II).
- Sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat (Kuadran III).
- Sektor relatif tertinggal (Kuadran IV).

Kategori lapangan usaha yang dianggap potensial ialah ketika kategori tersebut memenuhi kriteria memiliki pertumbuhan lebih tinggi daripada pertumbuhan kategori yang sama di level wilayah referensi dan memiliki kontribusi terhadap PDRB lebih tinggi daripada kontribusi kategori yang sama di level wilayah referensi; atau memenuhi salah satu diantaranya. Dengan kata lain, kategori lapangan usaha yang potensial di sebuah daerah menurut Analisis Tipologi Klassen ialah kategori yang masuk pada Kuadran 1, Kuadran 2, dan Kuadran 4.

Adapun hasil dari Analisis Tipologi Klassen Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut.

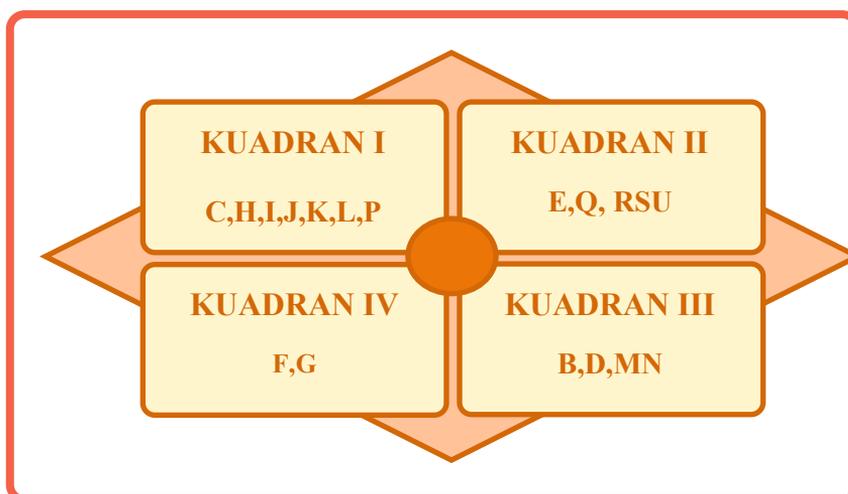
Tabel 3.3 Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Lampung Dengan Wilayah Referensi Sumatera, 2016

Kategori	Kontribusi PDRB Lampung	Kontribusi PDRB Sumatera	Pertumbuhan PDRB Lampung	Pertumbuhan PDRB Sumatera	Kesimpulan		
B	8,39	17,95		41,80	1,54	+	
C	28,97	26,86	+	44,28	35,33	+	+
D	0,17	0,23		108,11	55,77	+	
E	0,16	0,11	+	23,75	29,93		
F	13,41	14,75		39,86	49,33		
G	17,16	17,27		35,09	43,34		
H	8,14	5,50	+	66,48	50,87	+	+
I	2,40	2,02	+	57,85	52,54	+	+
J	5,87	3,08	+	85,89	61,03	+	+
K	3,40	3,13	+	54,88	53,93	+	+
L	4,50	3,56	+	54,51	48,77	+	+
MN	0,25	0,60		79,62	45,35	+	
P	4,32	2,80	+	58,03	48,11	+	+
Q	1,52	1,14	+	53,42	56,20		
RSU	1,35	1,00	+	35,01	42,61		

Sumber : BPS, Hasil Olah PDRB menurut Lapangan Usaha 2016

Hasil Analisis Topologi Klassen yang tersaji dalam Tabel 3.2 dapat disusun dalam bentuk matriks yang membentuk 4 kuadran Tipologi Klassen sebagai berikut.

Gambar 3.3 Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Lampung dengan Wilayah Referensi Sumatera, 2016



Analisis Tipologi Klassen yang dilakukan menunjukkan terdapat 7 (tujuh) kategori lapangan usaha berada pada Kuadran I, 3 (tiga) kategori di kuadran II, 3 (tiga) kategori di kuadran III, dan 2 (dua) kategori di kuadran IV.

V. Analisis Overlay

Analisis *Overlay* pada dasarnya menyandingkan hasil identifikasi potensi-potensi ekonomi dari beberapa alat analisis lainnya. Dalam buku ini, Analisis *Overlay* menyandingkan hasil dari Analisis *Location Quotient* (LQ), Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP), Analisis *Shift Share* (SS), dan Analisis Tipologi Klassen. Penyandingan ini ditujukan agar pemilihan kategori lapangan usaha yang unggulan dan potensial lebih akurat karena mempertimbangkan beberapa kriteria analisis. Adapun hasil Analisis *Overlay* tersaji dalam tabel 3.4.

Tabel 3.4 Hasil Analisis Overlay Provinsi Lampung dengan Wilayah Referensi Sumatera, 2016

Kategori	LQ	MRP	Shift Share	Klassen	Kesimpulan
B					
C	+		+	+	Unggulan
D		+	+		Potensial
E					
F					
G	+				Unggulan
H			+	+	Potensial
I		+	+	+	Potensial
J	+	+	+	+	Unggulan
K		+	+	+	Potensial
L		+	+	+	Potensial
MN		+	+		Potensial
P		+	+	+	Potensial
Q		+			Potensial
RSU	+				Unggulan

Sumber : BPS, Hasil Olah PDRB menurut Lapangan Usaha 2016

Pada bab-bab selanjutnya didalam publikasi ini, akan dibahas lebih lengkap 3 (tiga) kategori unggulan dan 1 bab untuk kategori potensial di Provinsi Lampung.

bab
4



Lampung
Pintu Gerbang
Perdagangan
Pulau Sumatera
dan Jawa

Lampung Pintu Gerbang Perdagangan Pulau Sumatera dan Jawa

Berdasarkan hasil Pencacahan Lengkap Sensus Ekonomi 2016 mencatat bahwa lebih dari 50 persen usaha yang terjaring di Provinsi Lampung adalah dari sektor Perdagangan, yaitu sebesar 57,46 persen. Dan sekitar 60 persen dari usaha perdagangan tersebut telah berdiri lebih dari 5 tahun yang lalu.

Perdagangan merupakan salah satu sektor yang memiliki peran strategis dalam pembangunan. Sektor perdagangan berperan dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, memenuhi kebutuhan pokok rakyat, serta mendorong pembentukan harga yang wajar. Pembangunan perdagangan sangat penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, dan memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam penciptaan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Kegiatan sektor perdagangan saling berkait dan saling menunjang dengan kegiatan sektor lainnya, seperti sektor produksi, yaitu pertanian, industri, dan pertambangan; sektor keuangan; sektor perhubungan dan telekomunikasi.

Posisi Lampung yang merupakan pintu gerbang menuju Jawa dan Sumatera sangat menguntungkan dalam alur perdagangan antar pulau yang dominan. Dalam sektor ekonomi, Lampung memiliki peluang yang besar dalam memantapkan diri menjadi pusat perdagangan dan jasa pada skala Sumatera bagian Selatan. Sejalan dengan aktivitas ekspor impor dan perdagangan antar pulau, Lampung memiliki peluang untuk menjadi pusat perdagangan hasil pertanian dan industri dari Sumatera bagian Selatan maupun yang didatangkan dari daerah luar.

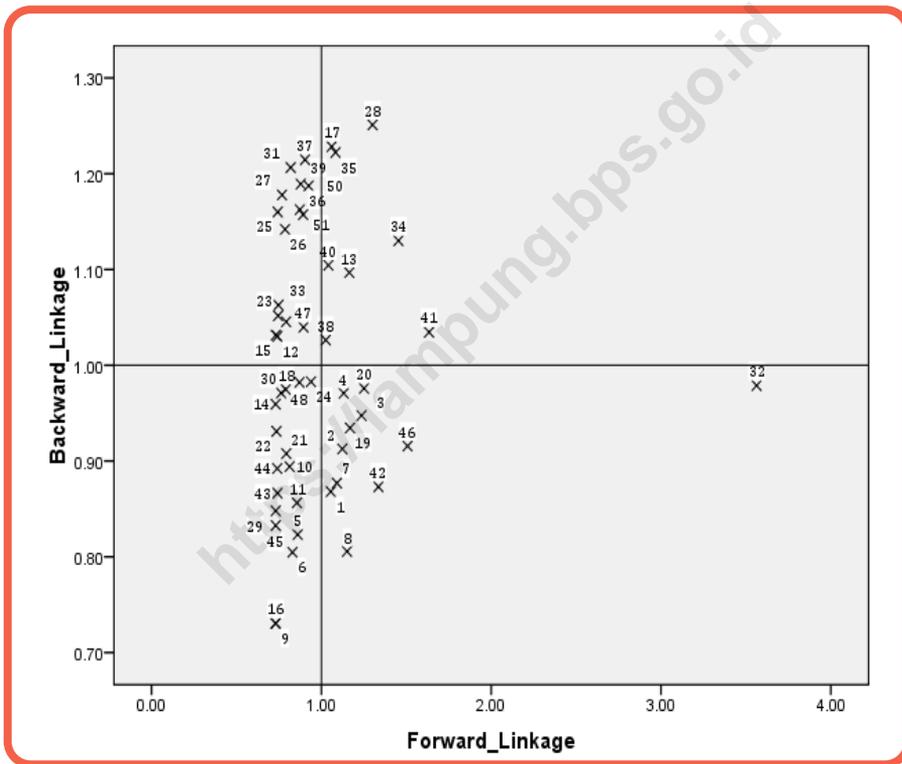
Kecenderungan perkembangan menunjukkan proses relokasi kegiatan ekonomi dari Pulau Jawa bagian Barat ke Lampung. Bahkan untuk beberapa sektor ditetapkan kebijaksanaan menjadikan Lampung sebagai basis produksi Nasional. Hal ini menjadikan Lampung potensial sebagai pusat distribusi barang dan jasa untuk wilayah Sumatera bagian Selatan.

Sektor Perdagangan Memiliki *Forward Linkage* yang Menonjol

Sektor perdagangan dikategorikan sebagai Industri Hulu yaitu sektor-sektor yang outputnya dibutuhkan atau terkait ke banyak

sektor lainnya. Hal ini berarti perdagangan banyak mensupply bahan-bahan baku bagi sektor-sektor lainnya. Tingkat keterkaitan ke depan (*forward linkage*) yang besar mengindikasikan besarnya daya penyebaran sektor perdagangan, di Provinsi Lampung atau banyaknya output sektor perdagangan yang digunakan sebagai input oleh proses produksi sektor-sektor ekonomi lainnya di Provinsi Lampung.

Gambar 4.1 Analisis Kuadran terhadap Keterkaitan Antarsektor di Provinsi Lampung



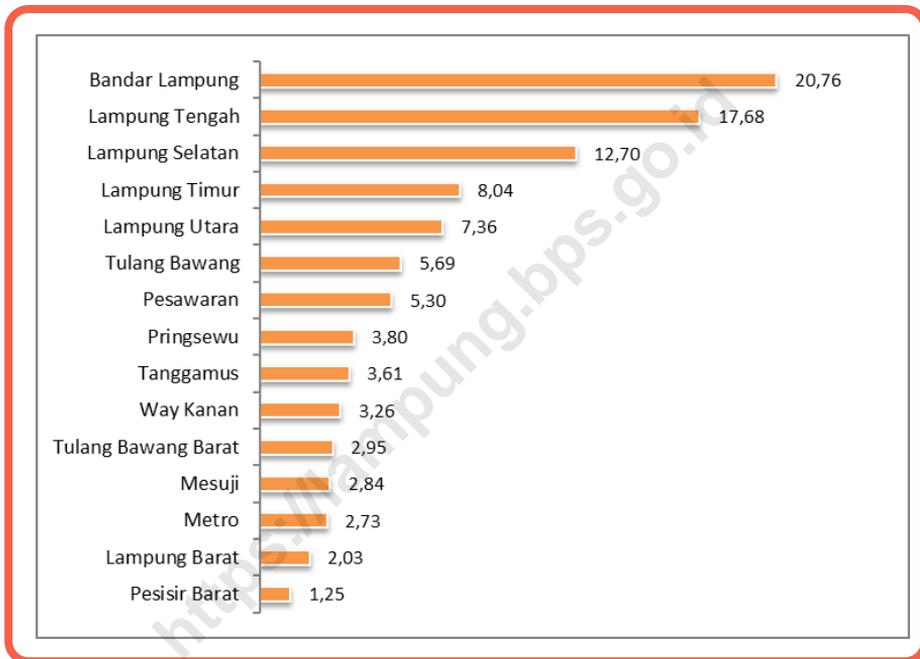
Sumber : IO Provinsi Lampung 2014

Selanjutnya, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor telah menyumbang sekitar 11,15 persen dari total PDRB Provinsi Lampung di tahun 2016. Sektor ini merupakan penyumbang terbesar ketiga setelah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan Industri Pengolahan. Ini menunjukkan potensi sektor ini yang cukup kuat di Provinsi Lampung. Jika dilihat menurut Kabupaten/kota, Kota Bandar Lampung penyumbang terbesar PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Provinsi Lampung, tercatat sebesar 20,76 persen. Selanjutnya Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Selatan di posisi kedua dan



ketiga dengan besaran masing-masing 17,68 persen untuk Kabupaten Lampung Tengah dan 12,70 persen untuk kabupaten Lampung Selatan.

Gambar 4.2 Kontribusi Masing-masing Kabupaten/kota dalam menciptakan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Provinsi Lampung (persen), 2016



Sumber : BPS, Publikasi Tinjauan Ekonomi Regional Kab/Kota 2016

Kota Bandar Lampung berkontribusi paling besar dalam menciptakan nilai tambah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Provinsi Lampung. Namun, dari jumlah usaha masih lebih sedikit dibandingkan Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur. Terdapat sekitar 66.873 usaha/perusahaan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di kabupaten Lampung Tengah, 64.832 ribu usaha/perusahaan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Kabupaten Lampung Timur, sedangkan Kota Bandar Lampung hanya sekitar 53.216 usaha/perusahaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jumlah usaha/perusahaan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Lampung Tengah dan Lampung Timur adalah dua terbesar di Provinsi Lampung, namun memberikan nilai tambah yang tidak besar.

Tabel 4.1 menggambarkan kecilnya rata-rata penyerapan tenaga kerja per usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Provinsi Lampung.

Jika dilihat distribusi per Kabupaten/kota, Lampung Tengah memiliki jumlah usaha/perusahaan paling besar, yakni 66.873 usaha/perusahaan. Sementara Kota Bandar Lampung memiliki jumlah tenaga kerja paling besar, tercatat 105.875 orang. Jika dihitung penyerapan tenaga kerja per usaha/perusahaan, rata-rata menyerap 1-2 orang per usaha/perusahaan. Kabupaten/kota yang menyerap tenaga kerja satu orang per usaha/perusahaan yakni Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Timur, Way Kanan, Pesawaran, dan Tulang Bawang Barat. Sementara sisanya menyerap tenaga kerja sebanyak dua orang per usaha/perusahaan.

Tabel 4.1 Jumlah Usaha/Perusahaan dan Tenaga Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Provinsi Lampung Menurut Kabupaten/Kota, 2016

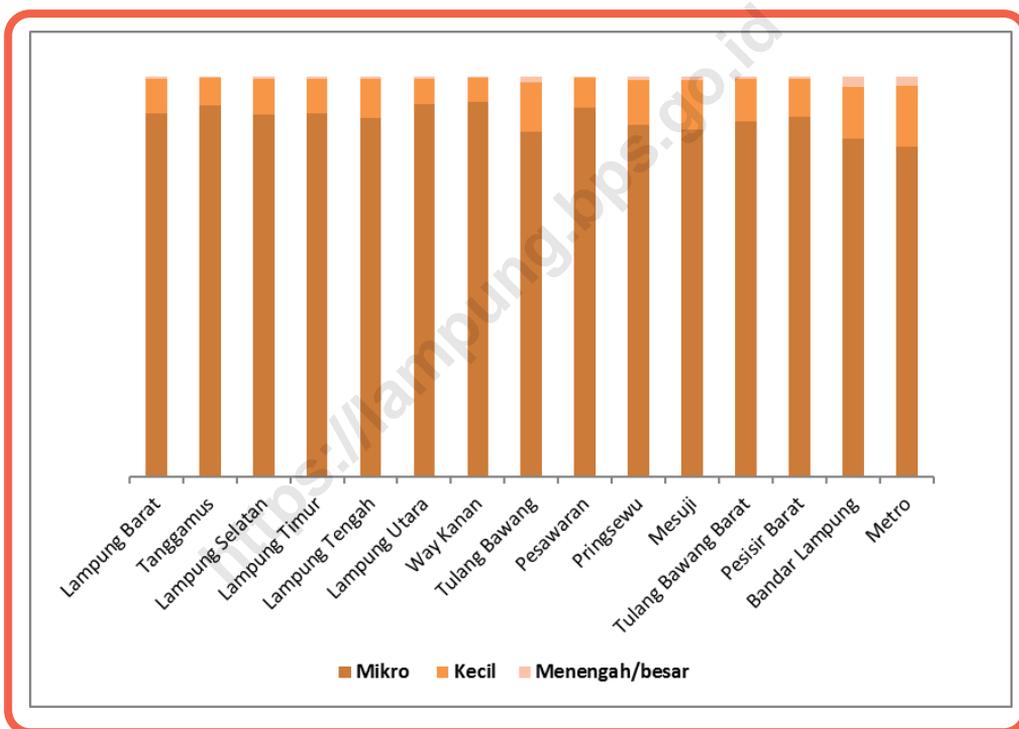
Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha		Tenaga Kerja		Tenaga Kerja per Perusahaan
	Jumlah	% terhadap Lampung	Jumlah	% terhadap Lampung	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lampung Barat	15.920	3,54	23.512	3,32	1
Tanggamus	32.982	7,33	47.182	6,67	1
Lampung Selatan	49.103	10,91	74.768	10,57	2
Lampung Timur	64.832	14,41	96.787	13,68	1
Lampung Tengah	66.873	14,86	102.458	14,49	2
Lampung Utara	34.444	7,65	54.607	7,72	2
Way Kanan	24.270	5,39	35.669	5,04	1
Tulang Bawang	20.385	4,53	31.648	4,47	2
Pesawaran	26.265	5,84	37.607	5,32	1
Pringsewu	21.022	4,67	32.505	4,60	2
Mesuji	10.170	2,26	15.425	2,18	2
Tulang Bawang Barat	12.752	2,83	18.422	2,60	1
Pesisir Barat	6.525	1,45	10.905	1,54	2
Bandar Lampung	53.216	11,82	105.875	14,97	2
Metro	11.303	2,51	19.961	2,82	2
Provinsi Lampung	450.062	100,00	707.331	100,00	2

Sumber : BPS, SE2016-L

Gambar 4.3 menunjukkan dominasi skala usaha kecil pada Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Tahun 2016 tercatat lebih dari 97 persen usaha/perusahaan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda

Motor di Provinsi Lampung terkategori Usaha Mikro Kecil (UMK). Komposisi UMB setiap Kabupaten/kota di Provinsi Lampung hampir seragam. Hanya Kota Bandar Lampung dan Metro yang memiliki persentase UMB di atas dua persen. Untuk Kota Bandar Lampung tercatat 2,52 persen dan Metro tercatat 2,31 persen.

Gambar 4.3 Persentase Usaha/Perusahaan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menurut Kabupaten/kota dan Skala Usaha di Provinsi Lampung, 2016

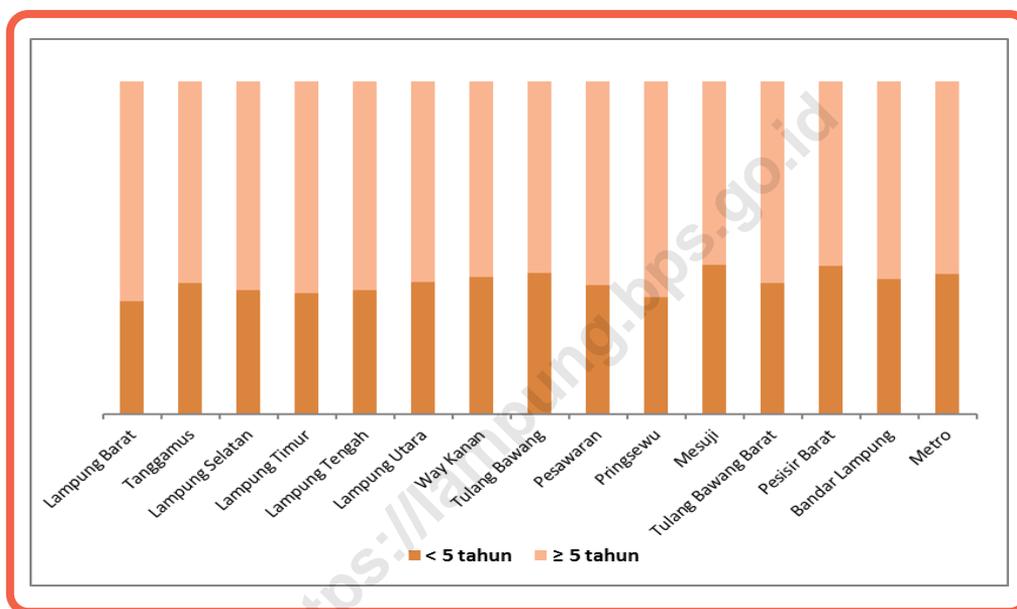


Sumber : BPS, SE2016-L

Selain dari penyerapan tenaga kerja, umur perusahaan merupakan indikator yang dapat menggambarkan ukuran perusahaan. Semakin lama perusahaan berdiri diasumsikan akan berkembang dan dapat menghasilkan pendapatan atau laba yang lebih tinggi (Zen dan Herman, 2006). Sementara itu Loughran dan Jay R. Ritter (2004) mengemukakan bahwa umur perusahaan sangat berhubungan dengan kapan waktu terbaik perusahaan untuk melakukan IPO (Initial Public Offering) atau Penawaran Saham Perdana. Tujuannya adalah untuk mengembangkan perusahaan. Dari data SE2016-L perusahaan-perusahaan di Provinsi Lampung lebih banyak yang berumur lima tahun ke bawah (dalam hal ini tahun 2012 dijadikan titik poin). Artinya lebih banyak perusahaan

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang tergolong usaha/perusahaan lama (Gambar 4.4).

Gambar 4.4 Persentase Usaha/Perusahaan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Provinsi Lampung menurut Kabupaten/Kota dan Umur Perusahaan, 2016



Sumber : BPS, SE2016-L

Persentase usaha/perusahaan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang berumur lebih dari lima tahun terbanyak ada di Kabupaten Lampung Barat, tercatat 66,14 persen. Sementara terkecil ada di Kabupaten Mesuji, tercatat 55,29 persen. Persentase usaha/perusahaan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang berumur kurang dari lima tahun terbanyak ada di Kabupaten Mesuji, tercatat 44,71 persen. Sedangkan terkecil ada di Kabupaten Lampung Barat, tercatat sebesar 33,86 persen.

Tingginya peranan sektor perdagangan dengan jumlah sumber daya yang dimiliki, serta dengan semakin tingginya persaingan di tingkat global maka mutlak diperlukan sebuah perencanaan strategi oleh pemerintah dalam mengembangkan sektor-sektor unggulan terutama bagi sektor-sektor yang memiliki nilai strategis tinggi yang dapat didukung melalui tersedianya jumlah sumber-sumber bahan bakunya, maupun dapat menjadi pendukung bagi keberadaan sektor-sektor lain dalam fungsinya sebagai penyedia input sehingga semakin akan berpengaruh terhadap daya saing sektor-sektor unggulan daerah maupun bagi perkembangan sektor-sektor lain.

bab 5



Industri
Primadona Ekonomi
Lampung

Industri Primadona Ekonomi Lampung

Kategori Industri Pengolahan merupakan salah satu kategori dengan jumlah usaha terbanyak berdasarkan hasil SE2016-Listing, yaitu mencapai 11 persen. Sejalan dengan itu, kategori Industri juga merupakan penyerap tenaga kerja terbanyak setelah Kategori Perdagangan di Lampung, yaitu sebesar 16 persen.

Tranformasi struktural merupakan prasyarat dan mesin utama pertumbuhan ekonomi, yang berarti perekonomian mengalami transformasi struktur ekonomi dari dominasi kategori pertanian tradisional ke kategori industri pengolahan atau jasa. Industri pengolahan termasuk salah satu tulang punggung perekonomian Lampung. Debat ahli ekonomi mengenai pertumbuhan seimbang (*balanced growth*) dan tidak seimbang (*unbalanced growth*) telah memberikan sumbangan bagi studi kuantitatif pola-pola pembangunan. Pendukung pertumbuhan seimbang seperti Nurkse (1953) atau Rosenstein-Rodan (1963) berargumen bahwa negara harus membangun berbagai industri secara simultan jika ingin mencapai pertumbuhan berkelanjutan.

Tipe pembangunan ini sering disebut sebagai pertumbuhan seimbang pada sisi permintaan, karena pembangunan industri ditentukan oleh permintaan atau pola pengeluaran dari konsumen dan investor. Pertumbuhan seimbang pada sisi penawaran menunjukkan perlunya membangun beberapa industri secara bersamaan untuk mencegah kemacetan penawaran.

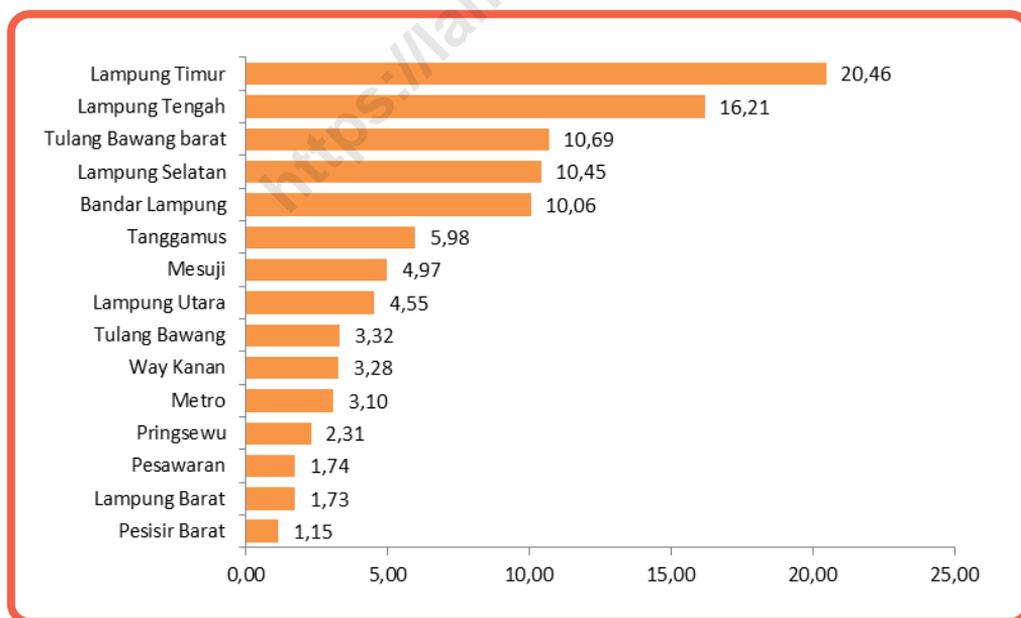
Selain menciptakan nilai tambah, industri pengolahan termasuk andalan untuk penyerapan tenaga kerja. Hal ini terlihat dari kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 2016 Lampung sebesar 18,83 yang berada pada posisi pertama diluar kategori pertanian. Tersedianya sumber daya alam terutama di kategori pertanian yang melimpah menjadikannya sebagai kategori unggulan penyumbang nilai tambah tertinggi provinsi ini. Dengan sumber daya alam yang melimpah tersebut, menjadikan sektor industri pengolahan memiliki potensi besar untuk dikembangkan.

Hasil Listing Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) menunjukkan bahwa jumlah usaha industri pengolahan (Kategori C) mencapai

11,40 persen dari total usaha non pertanian. Namun sebagian besar usaha industri pengolahan berskala kecil. Jumlah Usaha Mikro Kecil (UMK) sebesar 88,73 ribu usaha/perusahaan (99,40 persen). Penentuan skala usaha salah satunya mempertimbangkan jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja Industri, sejalan dengan jumlah usaha/perusahaan yang bergerak dibidang industri yaitu 270,13 ribu tenaga kerja atau sebanyak 16,31 persen dari total tenaga kerja yang ada di Provinsi Lampung berdasarkan hasil SE2016. Jika dilihat secara rata-rata, jumlah tenaga kerja pada industri pengolahan UMK mencapai 2 tenaga kerja per usaha, sementara untuk Usaha Menengah Besar (UMB) mencapai 166 tenaga kerja per usaha.

Selanjutnya, berdasarkan distribusinya, secara umum menunjukkan bahwa sebanyak 89,27 ribu juta usaha/perusahaan industri berada di Lampung Timur yakni mencapai 20,46 persen dari jumlah usaha/perusahaan Industri di Provinsi Lampung, diikuti Lampung Tengah sebesar 16,21 persen. Tulang Bawang Barat menempati peringkat ketiga dengan total usaha/perusahaan industri sebesar 10,69 persen.

Gambar 5.1 Persentase Usaha Industri menurut klasifikasi usaha se Provinsi Lampung, 2016

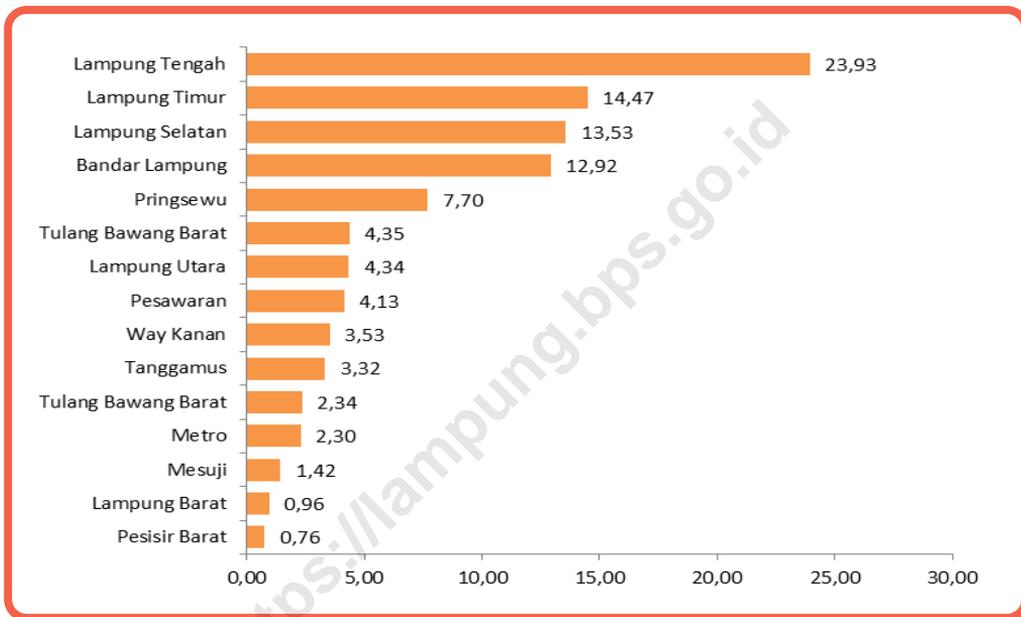


Sumber : BPS, SE2016-L

Namun, dari sisi penyerapan tenaga kerja kategori industri, Kabupaten Lampung Tengah menduduki peringkat teratas yaitu sebanyak 23,93 persen. Kabupaten Lampung Timur menduduki peringkat ke 2 dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 14,47 persen

dari total tenaga kerja pada kategori industri. Sebaliknya Kabupaten Pesisir Barat berada pada posisi terbawah dengan penyerapan tenaga kerja industri sebesar 0,76 persen, hal ini tentunya sejalan dengan jumlah usaha untuk kategori industri.

Gambar 5.2 Persentase Usaha Industri menurut Tenaga Kerja se Provinsi Lampung, 2016



Sumber : BPS, SE2016-L

Bila dilihat dari jumlah aktivitas ekonomi, sesungguhnya jumlah usaha kategori industri tidak terlalu banyak dan menempati urutan ketiga. Oleh sebab itu, pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal perlu mempertimbangkan banyak hal, diantaranya aspek nilai ekonomi yang dihasilkan, penyerapan tenaga kerja, penyediaan lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi, dan aspek lain yang menjadi pertimbangan dalam kebijakan perencanaan. Identifikasi kategori unggulan dengan menggunakan berbagai metode sangatlah diperlukan.

Seperti dijelaskan pada bab III , Hasil Analisis LQ, industri menempati posisi kedua berarti kategori tersebut merupakan kategori unggulan dalam menyerap tenaga kerja dibandingkan dengan kategori yang sama di wilayah Lampung. Demikian halnya dengan analisis shift share dan klassen, dimana kategori-kategori yang mempunyai daya saing yang tinggi menunjukkan potensi yang tinggi untuk dikembangkan.

Potensi dari usaha/perusahaan industri baru (yang berdiri < 5 tahun) juga tidak kalah penting. Hasil kajian berikut menunjukkan bahwa jumlah usaha baru yang berdiri < 5

tahun sekitar 30 persen dibandingkan yang lama. Hal ini merupakan peluang untuk dapat dijadikan salah satu mesin utama pertumbuhan ekonomi Lampung. Kabupaten dengan usaha baru tertinggi terdapat di Pesawaran yang mencapai 37 persen. Secara umum, Provinsi Lampung memiliki persentase usaha industri baru sebesar 29,18 persen.

Gambar 5.3 Persentase Usaha industri > 5 tahun dan <5 tahun di Provinsi Lampung, 2016



Sumber : BPS, SE2016-L

Selanjutnya, berdasarkan Status Badan Usaha, usaha/perusahaan di Provinsi Lampung didominasi oleh perusahaan tidak berbadan usaha yang mencapai 93,96 persen. Hal ini menunjukkan dominasi sektor informal yang cukup tinggi di Provinsi Lampung. Adanya sektor informal merupakan usaha yang tidak memerlukan modal banyak, pendidikan tinggi, pengurusan izin yang berbelit, dan teknologi canggih tapi memerlukan skill atau keahlian. Faktor-faktor seperti ini dapat mempermudah masyarakat untuk mengembangkan usaha di sektor ini. Berdasarkan distribusinya Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki usaha/perusahaan industri tertinggi yang tidak berbadan hukum yaitu mencapai 97,22 persen, diikuti oleh Mesuji sebesar 96,58. Sementara Lampung Barat memiliki usaha/perusahaan industri yang tidak berbadan hukum terendah yaitu sebesar 85,97 persen.

Tabel 5.1 Persentase Usaha Industri berdasarkan Status Badan Usaha di Provinsi Lampung, 2016

No.	Kabupaten/kota	Berbadan usaha	Tidak berbadan Usaha
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Lampung Barat	14,03	85,97
2	Tanggamus	4,51	95,49
3	Lampung Selatan	6,96	93,04
4	Lampung Timur	4,34	95,66
5	Lampung Tengah	7,54	92,46
6	Lampung Utara	9,01	90,99
7	Way Kanan	8,85	91,15
8	Tulang Bawang	9,21	90,79
9	Mesuji	3,42	96,58
10	Tulang Bawang barat	2,78	97,22
11	Pesawaran	3,99	96,01
12	Pringsewu	3,93	96,07
13	Pesisir Barat	5,95	94,05
14	Bandar Lampung	7,10	92,90
15	Metro	8,82	91,18
	Lampung	6,04	93,96

Sumber : BPS, SE2016-L

Agglomerasi Industri

Suatu daerah atau kota umumnya berkembang karena aglomerasi. Dengan aglomerasi, industri-industri atau perusahaan-perusahaan dapat melakukan kegiatan produksi dengan biaya yang lebih rendah.

Prasetyo Subono (1999) mengatakan bahwa selain industri memilih pola lokasi yang menyebar, ada pula perusahaan yang memilih pola lokasi berpadu (aglomerasi). Konsep isodapane dari Alfred Weber menjelaskan pentingnya perusahaan atau industri mengadakan aglomerasi. Konsep isodapane dari Alfred Weber menjelaskan pentingnya perusahaan atau industri mengadakan aglomerasi.

Isodopane memungkinkan sebuah perusahaan memilih lokasi yang berorientasi pada biaya transportasi, bila manfaat aglomerasi melebihi biaya transportasi tersebut. Dengan

perkataan lain, aglomerasi memberikan manfaat *external agglomeration economies* (penghematan aglomerasi) disamping internal agglomeration (penghematan aglomerasi internal).

Ada dua macam aglomerasi, yakni *localization economies* (penghematan lokasi) dan *urbanization economies*. Penghematan lokalisasi terjadi apabila biaya total rata-rata produksi dari industri-industri sejenis pada lokasi sama mengalami penurunan bila jumlah produksi dari berbagai industri di suatu lokasi mengalami peningkatan. Penghematan lokasi terjadi karena 3 alasan, yakni:

- Dalam pembelian input bersama dalam jumlah besar dari perusahaan sejenis dalam satu lokasi.
- Dalam pembelian input bersama dalam jumlah besar dari perusahaan sejenis dalam lokasi yang sama dari pemasok input yang sama
- Ekonomi pasar tenaga kerja (kemudahan memperoleh tenaga kerja).

Penghematan urbanisasi terjadi karena alasan-alasan yang sama seperti penghematan lokalisasi. Perusahaan yang sama dapat membeli secara bersama-sama pada pemasok bahan baku yang sama. Dengan kata lain perusahaan akan mudah mendapatkan tenaga kerja, memperoleh pertukaran informasi dan penyebaran teknologi secara cepat.

Salah satu aplikasi dari Aglomerasi Industri misalnya Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk membuat lingkungan kondusif bagi aktivitas investasi, ekspor, dan perdagangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Salah satu syarat pengembangan KEK adalah ketersediaan investor yang akan menggerakkan investasi di wilayah tersebut. KEK bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan mengurangi kesenjangan dalam masyarakat melalui hadirnya aktivitas ekonomi yang memberikan nilai tambah. Terbentuknya KEK diharapkan semakin membangun daya saing wilayah dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan pembangunan kawasan strategis bidang ekonomi di Wilayah Sumatera diarahkan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki skala ekonomi dengan orientasi daya saing nasional dan internasional berbasis produksi dan pengolahan hasil bumi serta menjadi lumbung energi nasional.

Percepatan pembangunan wilayah juga didukung oleh pembangunan lokasi industri berupa Kawasan Industri (KI). KI bertujuan untuk mengendalikan tata ruang, meningkatkan upaya industri yang berwawasan lingkungan, mempercepat pertumbuhan industri di daerah, meningkatkan daya saing industri, meningkatkan daya saing investasi,

serta memberikan kepastian lokasi dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang terkoordinasi antar kategori terkait. Arah pengembangan KI di luar Pulau Jawa diharapkan dapat menciptakan pemerataan pembangunan ekonomi dan meningkatkan efisiensi sistem logistik dan KI sebagai penggerak utama pusat-pusat pertumbuhan baru.

Penciptaan kawasan industri merupakan salah satu rencana strategis untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Daerah yang ditetapkan menjadi KI di Lampung adalah di wilayah Tanggamus, yang berlokasi di Kawasan Batu Balai Kabupaten Tanggamus. KI Tanggamus merupakan kawasan industri maritim yang bergerak dalam industri pembuatan kapal. Dalam RTRW Kabupaten Tanggamus 2011-2031 sendiri telah ditetapkan kawasan strategis yang akan dikembangkan untuk beberapa aktivitas kegiatan baik skala lokal, regional, maupun nasional. Pengembangan kawasan strategis tersebut terdiri atas pengembangan industri maritim (bidang pembuatan kapal), kilang minyak pertamina, dan dermaga pelabuhan nasional. Kawasan Industri maritim terpadu merupakan kawasan klaster industri pembangunan kapal baru, bangunan lepas pantai, reparasi kapal, serta ship recycle yang dilengkapi dengan industri penunjang dukungan perusahaan logistik, infrastruktur industri, dan fasilitas umum lengkap.

Untuk kategori industri, salah satu tantangan yang dihadapi industri nasional saat ini adalah daya saing yang rendah di pasar internasional. Faktor yang menyebabkan rendahnya daya saing tersebut antara lain adanya peningkatan biaya energi, tingginya biaya ekonomi, serta belum memadainya layanan birokrasi. Tantangan lain yang dihadapi adalah masih lemahnya keterkaitan antar industri (industri hulu dan hilir maupun antara industri besar dengan industri kecil dan menengah), adanya keterbatasan berproduksi barang setengah jadi dan komponen di dalam negeri, keterbatasan industri berteknologi tinggi, kesenjangan kemampuan ekonomi antar daerah, serta ketergantungan ekspor pada beberapa komoditas tertentu.

Untuk meningkatkan daya saing, Provinsi Lampung dapat mengembangkan agroindustri. Di satu sisi pengembangan agroindustri ini dapat meningkatkan permintaan input antara (intermediate input) seperti bahan baku tanaman pangan, tanaman perkebunan, perikanan dan lain-lain yang di pasok oleh kategori pertanian. Hal ini disebut keterkaitan ke belakang (backward linkage). Di pihak lain, kategori agroindustri meningkatkan penawaran output untuk kategori-kategori lain seperti perdagangan dan industri lainnya, di samping ada juga yang digunakan sendiri oleh agroindustri. Hal ini disebut keterkaitan ke depan (forward linkage). Sehingga kedua aspek inilah yang dikenal sebagai efek keterkaitan antar industri (interindustry linkage effect), yang mengarah ke belakang dan ke depan.

Selain itu, pengembangan kategori agroindustri akan meningkatkan penyediaan kesempatan kerja dan pendapatan rumah tangga, yang selanjutnya meningkatkan permintaan terhadap barang-barang konsumsi yang dihasilkan kategori lain. Keinginan untuk mengkonsumsi barang-barang tersebut merupakan dorongan untuk meningkatkan produktivitas dan akhirnya meningkatkan tabungan di kategori agroindustri. Hubungan ini dikenal sebagai efek keterkaitan ketenagakerjaan (*employment linkage effect*) dari efek keterkaitan penciptaan pendapatan (*income generation linkage effect*).

<https://lampung.bps.go.id>



Perkembangan Informasi dan Komunikasi di Provinsi Lampung

Perkembangan Informasi dan Komunikasi di Provinsi Lampung

Teknologi informasi dan komunikasi memegang peranan penting, Cisco memperkirakan tahun 2019 data akan tumbuh dua kali lipat tahun 2016. Sektor informasi memang masih memberikan sumbangan yang tidak signifikan yaitu sebesar 3,82 persen terhadap PDRB namun memiliki laju pertumbuhan yang cukup fantastis diatas 8 persen dari tahun 2012 – 2016.

Perkembangan teknologi pada saat ini sangat pesat sekali terutama teknologi di bidang informasi komunikasi baik dari sisi kecepatan maupun kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi yang dibutuhkan juga semakin berkembang. Teknologi informasi ini sangat penting sekali bagi suatu negara apalagi bagi negara yang berkembang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia pada umumnya juga tidak kalah pesatnya dibanding dengan negara-negara lain. Kehadiran komputer, internet, telepon seluler, dan berbagai alat teknologi informasi dan komunikasi membuat arus informasi semakin lancar. Setiap saat miliaran orang berkomunikasi menggunakan komputer, Tablet, peralatan GPS, dan smart phone, dll, semuanya menggunakan data.

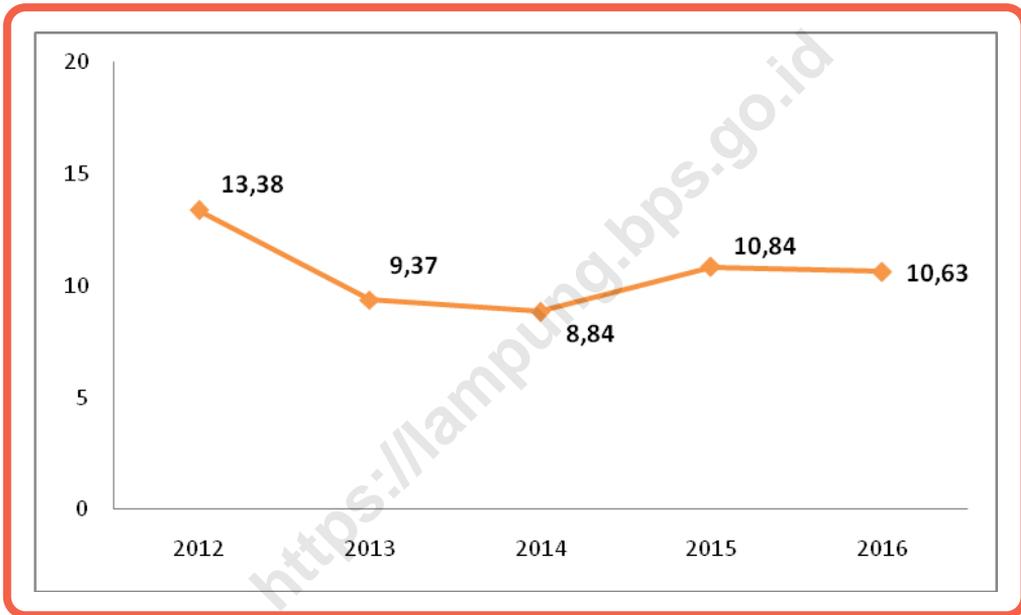
Tidak heran, laporan Cisco Visual Networking Index mengatakan lalu lintas internet global setidaknya telah mencapai 1,2 zetabyte atau 1,2 triliun gigabytes pada tahun 2016 dan memperkirakan tahun 2019 akan tumbuh dua kali lipat dari tahun 2016. Sehingga wajarlah pernyataan General Manager microsoft, Eron Kelly memprediksi bahwa dalam 5 tahun kedepan bahwa kita akan menghasilkan data yang sebelumnya dihasilkan selama 5000 tahun. Big data adalah sebuah kekuatan teknologi di era revolusi industri keempat.

“Revolusi digital” telah memicu ledakan informasi maupun banjir data yang dikenal dengan istilah “Big data”. Big data memiliki karakteristik selain menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar dan juga dihasilkan dengan sangat cepat, variasi data tercipta juga sangat beragam, “ Volume, Variety dan Velocity” .

Sektor Informasi dan Komunikasi telah menyumbang sekitar 3,82 persen dari total PDRB Provinsi Lampung di tahun 2016. Potensi Sektor Informasi dan Komunikasi juga tergambarkan melalui laju pertumbuhan ekonominya. Selama kurun waktu 2012-2016, sektor ini memiliki laju pertumbuhan yang selalu positif dan selalu di

atas angka delapan persen. Hal ini mencerminkan bahwa nilai PDRB yang dihasilkan Sektor Informasi dan Komunikasi di Provinsi Lampung cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2016, laju pertumbuhan sektor Informasi dan Komunikasi tercatat sebesar 10,63 persen.

Gambar 6.1 Laju Pertumbuhan Sektor Informasi dan Komunikasi di Provinsi Lampung (persen), 2012-2016



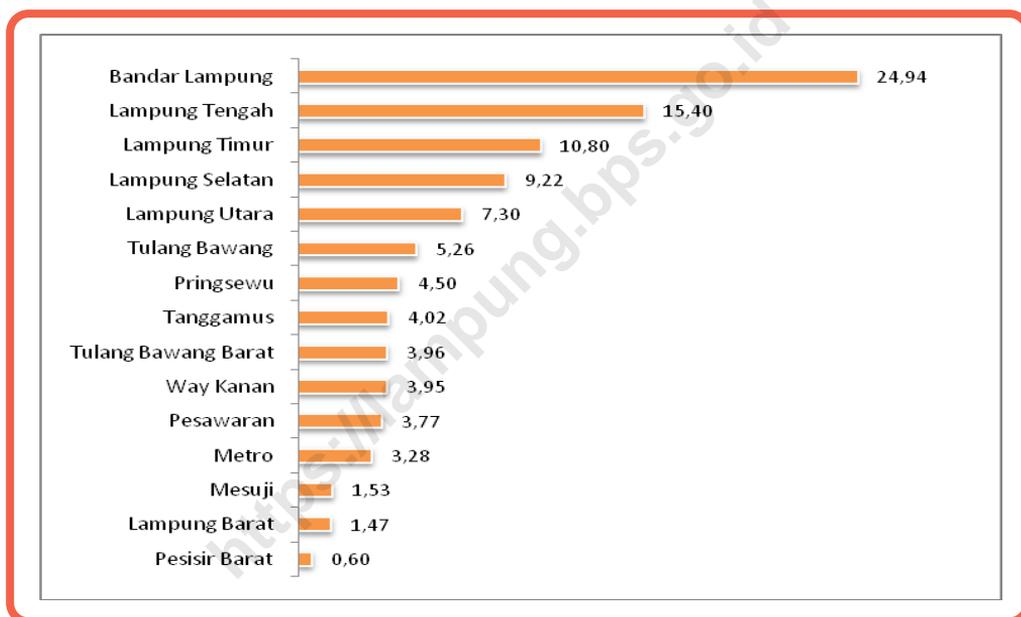
Sumber : BPS, Publikasi PDRB Provinsi Lampung menurut Lapangan Usaha 2012-2016

Jika dilihat menurut Kabupaten/kota, Bandar Lampung penyumbang terbesar PDRB Informasi dan Komunikasi Provinsi Lampung, tercatat sebesar 24,94 persen. Selanjutnya Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur di posisi kedua dan ketiga dengan besaran masing-masing 15,40 persen untuk Kabupaten Lampung Tengah dan 10,80 persen untuk kabupaten Lampung Timur.

Berdasarkan hasil SE2016-L, jumlah usaha/perusahaan sektor Informasi dan Komunikasi di Provinsi Lampung tercatat 23.374 usaha/perusahaan. Sebanyak 17,09 persen jumlah usaha/perusahaan sektor Informasi dan Komunikasi ada di Kota Bandar Lampung. Hal ini wajar mengingat Kota Bandar Lampung berkontribusi paling besar dalam menciptakan nilai tambah sektor Informasi dan Komunikasi di Provinsi Lampung. Kabupaten Lampung Timur menempati tempat kedua terbanyak jumlah usaha/perusahaan Sektor Informasi dan Komunikasi, tercatat sebesar 15,84 persen. Tempat

ketiga diraih oleh Kabupaten Lampung Tengah dengan jumlah usaha/perusahaan sebanyak 12,41 persen dari jumlah total usaha/perusahaan yang ada di Lampung. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jumlah usaha/perusahaan Informasi dan Komunikasi di Lampung Timur adalah dua terbesar di Provinsi Lampung, namun memberikan nilai tambah yang tidak besar.

Gambar 6.2 Kontribusi Masing-masing Kabupaten/kota dalam menciptakan PDRB Informasi dan Komunikasi di Provinsi Lampung (persen), 2016



Sumber : BPS, Publikasi PDRB Provinsi Lampung menurut Lapangan Usaha 2012-2016

Tabel 6.1 menggambarkan kecilnya rata-rata penyerapan tenaga kerja per usaha Informasi dan Komunikasi di Provinsi Lampung. Jika dilihat distribusi per Kabupaten/kota, Bandar Lampung memiliki jumlah tenaga kerja terbesar, tercatat sebesar 19,63 persen dari total jumlah tenaga kerja sektor Informasi dan Komunikasi di Provinsi Lampung. Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Tengah menempati posisi kedua dan ketiga dengan persentase tenaga kerja masing-masing sebesar 14,83 persen dan 12,16 persen. Jika dihitung penyerapan tenaga kerja per usaha/perusahaan, rata-rata sektor Informasi dan Komunikasi menyerap satu orang per usaha/perusahaan, kecuali Kabupaten Pesisir Barat, Kota Bandar Lampung dan Metro yang menyerap tenaga kerja sebanyak dua orang per usaha/perusahaan.

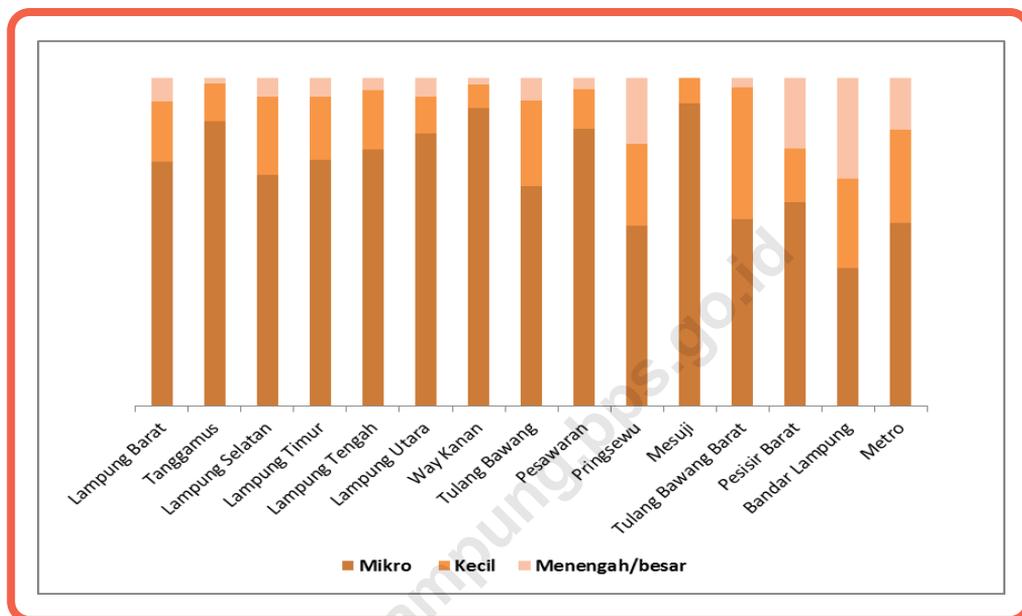
Tabel 6.1 Jumlah Usaha/Perusahaan dan Tenaga Sektor Informasi dan Komunikasi di Provinsi Lampung Menurut Kabupaten/Kota, 2016

Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha		Tenaga Kerja		Tenaga Kerja per Perusahaan
	Jumlah	% terhadap Lampung	Jumlah	% terhadap Lampung	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lampung Barat	504	2,16	661	2,06	1
Tanggamus	1.567	6,70	1.979	6,16	1
Lampung Selatan	2.623	11,22	3.709	11,54	1
Lampung Timur	3.703	15,84	4.765	14,83	1
Lampung Tengah	2.900	12,41	3.906	12,16	1
Lampung Utara	1.973	8,44	2.742	8,53	1
Way Kanan	1.084	4,64	1.319	4,11	1
Tulang Bawang	953	4,08	1.270	3,95	1
Pesawaran	1.299	5,56	1.602	4,99	1
Pringsewu	743	3,18	983	3,06	1
Mesuji	560	2,40	662	2,06	1
Tulang Bawang Barat	482	2,06	625	1,95	1
Pesisir Barat	132	0,56	216	0,67	2
Bandar Lampung	3.994	17,09	6.306	19,63	2
Metro	857	3,67	1.384	4,31	2
Provinsi Lampung	23.374	100,00	32.129	100,00	1

Sumber : BPS, SE2016-L

Gambar 6.3 menunjukkan dominasi skala usaha kecil pada Sektor Informasi dan Komunikasi. Tahun 2016 tercatat lebih dari 95 persen usaha/perusahaan Informasi dan Komunikasi di Provinsi Lampung terkategori Usaha Mikro Kecil (UMK), bahkan di Kabupaten Mesuji UMK sektor ini mencapai 100 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada Usaha Menengah Besar (UMB) sektor Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Mesuji. Komposisi UMB setiap Kabupaten/kota di Provinsi Lampung hampir seragam. Di Provinsi Lampung terdapat empat kabupaten/kota yang memiliki persentase UMB di atas dua persen yaitu Kabupaten Pringsewu, Pesisir Barat, Kota Bandar Lampung, dan Metro dengan persentase masing-masing sebesar 2,83 persen; 3,03 persen; 4,31 persen; dan 2,22 persen.

Gambar 6.3 Persentase Usaha/Perusahaan Informasi dan Komunikasi menurut Kabupaten/kota dan Skala Usaha, 2016

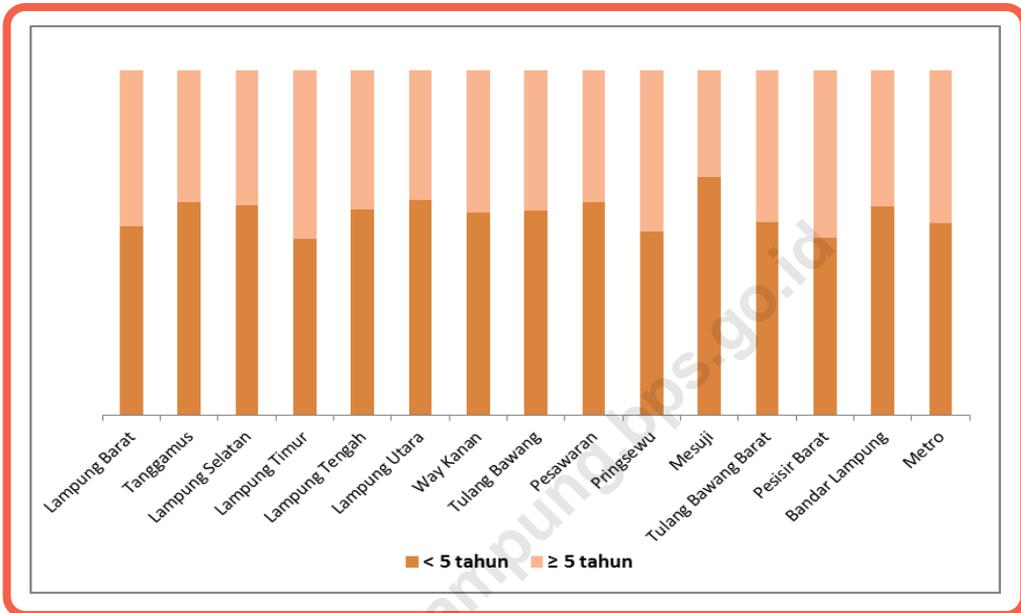


Sumber : BPS, SE2016-L

Selain dari penyerapan tenaga kerja, umur perusahaan merupakan indikator yang dapat menggambarkan ukuran perusahaan. Semakin lama perusahaan berdiri diasumsikan akan berkembang dan dapat menghasilkan pendapatan atau laba yang lebih tinggi (Zen dan Herman, 2006). Dari data SE2016-L usaha/perusahaan Sektor Informasi dan Komunikasi di Provinsi Lampung lebih banyak yang berumur lima tahun ke bawah (dalam hal ini tahun 2012 dijadikan titik poin). Artinya lebih banyak perusahaan Sektor Informasi dan Komunikasi yang tergolong usaha/perusahaan baru (Gambar 6.4).

Persentase usaha/perusahaan sektor Informasi dan Komunikasi yang berumur lebih dari lima tahun terbanyak ada di Kabupaten Lampung Timur, tercatat 49,07 persen. Sementara terkecil ada di Kabupaten Mesuji, tercatat 31,07 persen. Persentase usaha/perusahaan sektor Informasi dan Komunikasi yang berumur kurang dari lima tahun terbanyak ada di Kabupaten Mesuji, tercatat 68,93 persen. Sedangkan terkecil ada di Kabupaten Lampung Timur, tercatat sebesar 50,93 persen.

Gambar 6.4 Persentase Usaha/Perusahaan Informasi dan Komunikasi di Provinsi Lampung menurut Kabupaten/Kota dan Umur Perusahaan, 2016



Sumber : BPS, SE2016-L



Menggali Potensi Wisata Lampung

Menggali Potensi Wisata Lampung

Sektor Pariwisata merupakan solusi terbaik perekonomian dan budaya bahkan dapat menambah pundi-pundi devisa. Lampung menyimpan potensi wisata yang besar, namun sayangnya berdasarkan laporan MP3EL hanya 40 persen saja yang dikelola masyarakat. Jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Lampung masih sebesar 1,56 persen, padahal pertengahan tahun 2017 turis yang melancong mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 6,4 persen tercatat 598 juta turis.

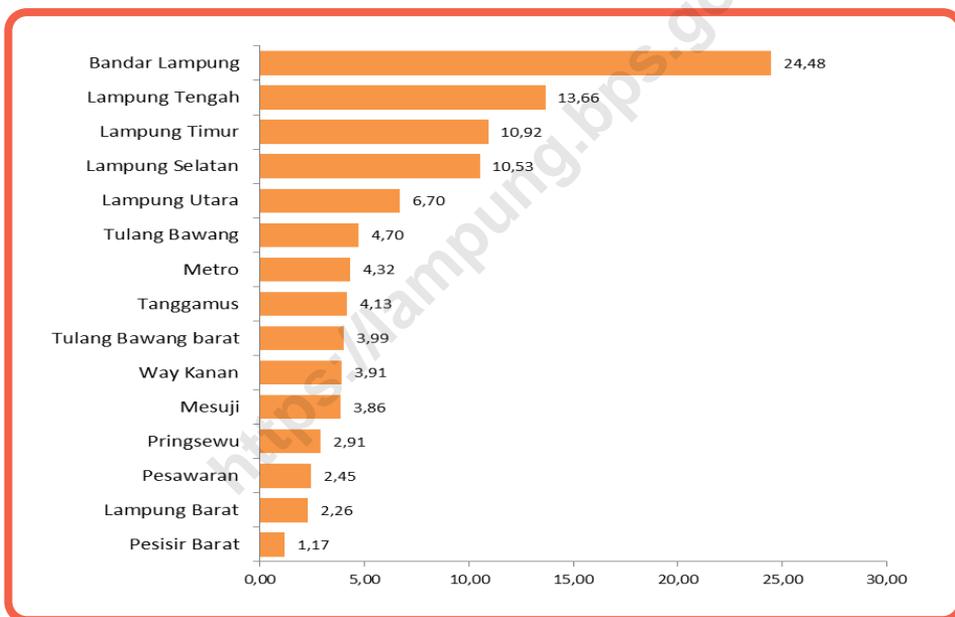
Pariwisata merupakan kegiatan yang sangat strategis baik dari perpektif ekonomi maupun budaya. Pariwisata selain dapat mendorong terciptanya lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat, pariwisata juga turut membantu melestarikan budaya lokal. Memajukan pariwisata juga merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan ekspor dari komoditas yang bersumber dari sumber daya alam seperti migas, batubara dan kelapa sawit. Pembangunan pariwisata menjadi solusi terbaik untuk menambah pundi-pundi devisa.

Provinsi Lampung menyimpan potensi wisata yang memiliki keunikan tersendiri karena terdapat banyak gugusan pulau dan pantai sebagai wisata perairan (bahari) dan olahraga air yaitu selancar, seperti Kabupaten Lampung Barat, Lampung Selatan dan Tanggamus. Potensi daerah areal pesisir seperti Tanjung Setia, yang panjangnya mencapai 220 Km merupakan wisata surfing (selancar) terbaik kedua di dunia. Daerah daratan terdapat potensi pariwisata berupa wisata budaya, agrowisata, air terjun, dan danau. Selain itu, objek wisata sejarah dan budaya pun menarik wisatawan yang datang berkunjung ke Lampung. Berdasarkan laporan MP3EL hanya 40% saja yang dikelola oleh masyarakat.

Berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Provinsi Lampung Tahun 2012-2031, terdapat 7 (tujuh) Kawasan Wisata Unggulan (KWU) di Provinsi Lampung, yang dikelompokkan menurut jenis dan tingkat perkembangan yang berbeda-beda dengan segmen pasar wisatawan yang berlainan pula. Sehingga wajar, pariwisata dijadikan sebagai salah satu prioritas pembangunan pemerintah dalam Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Lampung (MP3EL), peluang sektor pariwisata sebagai sumber devisa di Provinsi Lampung akan semakin besar.

Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto pendekatan Produksi (sektoral) peranan sektor Akomodasi dan konsumsi terhadap PDRB yaitu sebesar 1,5 persen, namun peranan sektor ini semakin bertambah beberapa tahun terakhir dengan pertumbuhan diatas 5 persen. Jumlah Aktivitas Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebanyak 94,90 ribu di Lampung. Hampir seperempatnya berada di Bandar Lampung. Lampung Tengah menempati posisi kedua terbanyak, yakni sebesar 13,66 persen (Tabel 6.1). Tentunya hal ini didukung oleh aktivitas hotel-hotel yang banyak beroperasi di Bandar Lampung berkelas lokal maupun internasional.

Gambar 7.1 Distribusi Jumlah Usaha Akomodasi dan Konsumsi se-Provinsi Lampung, 2016



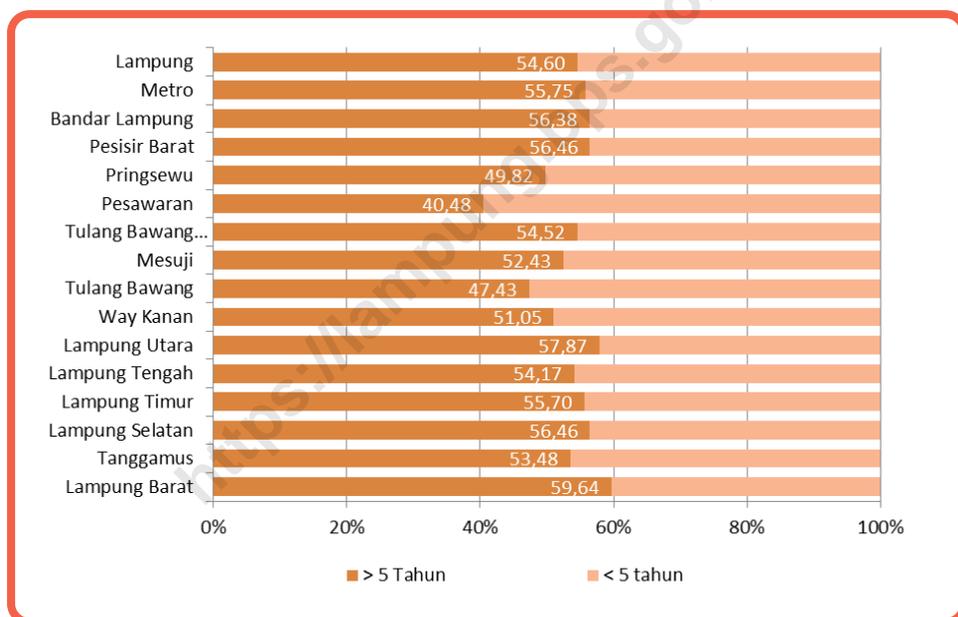
Sumber : BPS, SE2016-L

Start up Bisnis Sektor Akomodasi dan Konsumsi

Pemerintah sesungguhnya mampu membantu pertumbuhan dan pengembangan usaha. Hal tersebut dilakukan dengan beragam cara mulai dari insentif khusus sampai penciptaan suasana ramah-bisnis, pelatihan karyawan, lahan gratis, kredit bunga ringan, perbaikan infrastruktur, sampai percepatan proses perijinan. Sektor usaha akan maju pesat jika mereka memiliki kemudahan memindahkan bahan baku ke pabrik dan memindahkan barang jadi ke lokasi usaha dan area pemasaran dengan cepat. Jaminan infrastruktur yang memadai seperti : jalan raya, jembatan, jalur kereta, Bandar udara, pelabuhan, sistem telekomunikasi dan jalur energi, disinilah peran pemerintah dalam mendorong tumbuhnya dunia usaha akan semakin diperlukan.

Peran pemerintah cukup kondusif dalam mendukung perkembangan usaha pada sektor ini di Provinsi Lampung. Hal ini ditunjukkan dengan komposisi capaian jumlah perusahaan yang baru berdiri 5 tahun kebawah dengan perusahaan yang diatas 5 tahun yang hampir sama. Demikian halnya dengan komposisi di seluruh kabupaten/kota se- Provinsi Lampung. Bahkan Pesawaran memiliki jumlah usaha akomodasi dan konsumsi yang baru berdiri sebesar 60 persen. Hal ini tentunya merupakan pencapaian yang membanggakan seperti tampak pada gambar di bawah ini.

Gambar 7.2 Komposisi Perusahaan dibawah 5 tahun dan diatas 5 tahun di Provinsi Lampung, 2016



Sumber : BPS, SE2016-L

Dominasi Sektor Informal pada Industri Pariwisata

Pengalaman beberapa negara maju menunjukkan bahwa usaha besar memberikan sumbangan positif terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. Sebenarnya justru usaha kecil menengah yang sangat berperan dalam menciptakan lapangan kerja. Sektor usaha kecil menengah ini yang selalu diandalkan ketika negara berada dalam kondisi krisis ekonomi. Memang ada keraguan terhadap kemampuan usaha kecil menengah melakukan inovasi. Untuk melakukan inovasi dibutuhkan dana yang cukup besar dan pasar yang luas. Usaha kecil menengah tampaknya sulit memenuhi dua kondisi di atas. Namun demikian usaha kecil menengah dapat memainkan peran menjadi pemasok perusahaan besar melalui *sub-contracting*. Dengan kerja sama seperti ini otomatis akan terjadi proses pemerataan karena adanya “efek menetes ke bawah”.

Usaha kecil di sektor informal bukanlah pilihan usaha yang terbaik tapi bisa dianggap pilihan kedua yang terbaik (*second best choice*). Sektor informal adalah bagian dari suatu model usaha yang berada di luar jangkauan aturan pemerintah. Tentu ini berbeda dengan sektor formal, sektor ini tidak perlu memperhatikan aturan pemerintah seperti mendapat ijin usaha dan aturan kepegawaian (Marcouiller & Young, 1995).

Hasil SE 2016 Listing menunjukkan bahwa sebagian besar (97 persen) akomodasi dan konsumsi di Provinsi Lampung tidak berbadan hukum. Hal ini merupakan pertanda bagaimana kekuatan ekonomi sektor informal. Di negara berkembang sebagian besar angkatan kerja terlibat di sektor informal. Sektor ini hampir tidak tercatat dalam statistik ekonomi resmi suatu negara. Padahal aktivitas informal seringkali memainkan peran penting sebagai basis sumber kehidupan sebagian besar penduduk di wilayah-wilayah yang sedang berkembang. Kegiatan sektor informal sering juga disebut sebagai *underground economy* (Gerxhani 2003). Kata *underground* disini ingin menunjukkan bahwa sektor informal tidak hanya merupakan kegiatan yang bersifat legal saja namun juga bisa mencakup kegiatan ilegal.

Sektor modern tidak mampu menyerap kelebihan tenaga kerja karena pertumbuhan penduduk lebih pesat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi. Banyak orang masuk ke sektor informal karena mereka tidak tertampung di sektor moderen. Kelembagaan juga dilihat sebagai faktor determinan yang dapat mendorong atau mengurangi tumbuhnya kegiatan ekonomi sektor informal.

Suatu negara berkembang yang mulai menapaki arus modernisasi kadang menganggap bahwa sektor informal sebagai lambang keterbelakangan dan lambang tradisional sehingga perlu dihilangkan. Baik kaum liberal maupun penganut aliran kendali negara (*state control*) kurang mendukung kehadiran sektor informal yang luas. Memang terdapat pandangan yang menyatakan bahwa negara tidak dapat berbuat banyak ketika berhadapan dengan sektor informal. Mereka yang menganut perspektif kendali negara (*state control*) mengusulkan agar pembangunan sektor moderen perlu dipercepat melalui intervensi negara bahkan bila perlu negara harus mempunyai kendali atas semua sektor.

Tantangan yang sering dihadapi pemerintah daerah adalah pembentukan entrepreneur lokal. Pada umumnya pemerintah lokal hanya konsentrasi pada keinginan menarik entrepreneur dari luar wilayah dan melupakan potensi entrepreneur lokal yang berdomisili di wilayah bersangkutan. Kebijakan publik pemerintah daerah seharusnya merangsang pengembangan entrepreneur lokal. Memang tidak salah menarik entrepreneur luar jika terjadi kekurangan stok entrepreneur lokal. Namun yang sering terjadi adalah pemerintah daerah menganaktirikan pengusaha lokal. Hal ini dikarenakan adanya pemahaman yang keliru yang melihat bahwa hanya pemodal dari luar wilayah

yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Salah satu ciri usaha di daerah adalah jumlah usaha kecil dan menengah yang cukup banyak. Jenis usaha ini sering diabaikan karena dianggap kurang berperan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Selain itu Investasi di negara berkembang lebih banyak mengandalkan pinjaman luar negeri dan sangat terbatas. Pemerintah memiliki kemampuan terbatas dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan demikian sektor informal diharapkan tidak lagi dianggap sebagai sektor marjinal namun menjadi sektor ekonomi yang membantu pemerintah dalam memecahkan masalah pengangguran di dalam negeri.

Tabel 7.1 Persentase Usaha Akomodasi dan Konsumsi berdasarkan Status Badan Usaha di Provinsi Lampung, 2016

No.	Kabupaten/kota	Berbadan Usaha	Tidak berbadan Usaha
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Lampung Barat	8,15	91,85
2	Tanggamus	1,58	98,42
3	Lampung Selatan	1,29	98,71
4	Lampung Timur	1,90	98,10
5	Lampung Tengah	2,14	97,86
6	Lampung Utara	3,81	96,19
7	Way Kanan	2,67	97,33
8	Tulang Bawang	2,13	97,87
9	Mesuji	0,96	99,04
10	Tulang Bawang Barat	1,88	98,12
11	Pesawaran	1,98	98,02
12	Pringsewu	0,80	99,20
13	Pesisir Barat	8,76	91,24
71	Bandar Lampung	2,97	97,03
72	Metro	4,02	95,98
	Lampung	2,53	97,47

Sumber : BPS, SE2016-L

Potensi Jumlah Wisatawan yang Semakin Membaik

Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Lampung tahun 2016 berjumlah sekitar 7,4 juta orang atau naik sekitar 25,09 persen dibandingkan dengan tahun 2015 yang berjumlah 5,6 juta orang. Namun sayangnya dari jumlah wisatawan tersebut, hanya 115.053 orang yang merupakan wisatawan asing dengan persentase sebesar 1,56 persen .

Berdasarkan data rata-rata lama menginap (malam), wisatawan mancanegara cenderung menginap lebih lama dibandingkan dengan wisatawan nusantara. Lama menginap wisatawan mancanegara pada hotel Non Bintang sekitar 6 hari sedangkan wisatawan nusantara hanya sekitar 1— 2 hari.

Jumlah perusahaan/jasa akomodasi lainnya di Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Pada tahun 2016 terdapat 302 perusahaan/jasa akomodasi lainnya di Provinsi Lampung yang terdiri dari hotel bintang, hotel non bintang/ melati, dan jenis akomodasi lainnya. Seluruh akomodasi tersebut menyediakan 7.068 kamar dan 11.067 tempat tidur.

Tingkat penghunian kamar (TPK) pada hotel bintang tahun 2016 mencapai 51,18 persen, sementara hotel non bintang sebesar 39,10 persen. TPK 2016 baik bintang maupun non bintang mengalami sedikit kenaikan dibandingkan dengan TPK tahun sebelumnya.

Tabel 7.2 Jumlah Tamu Menginap dan Rata-rata Lama Menginap di Provinsi Lampung, 2014-2016

Uraian	Jumlah Menginap di Hotel			Rata-rata Lama Menginap (malam)		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
- Wisatawan Mancanegara	14 476	11 139	4 681			
* Bintang	12 732	4 615	3 720	2,57	2.45	3,5
* Non Bintang	1 744	6 524	967	6,26	2.76	6,1
- Wisatawan Nusantara	565 705	1 158 661	534 934			
* Bintang	130 534	165 339	134 674	1,99	1.62	1,76
* Non Bintang	791 451	993 262	405 260	1,36	1.12	1,33

Sumber : BPS, Publikasi TPK Provinsi Lampung

Potensi Wisata Dunia merupakan Salah Satu Peluang

Pertengahan 2017, jumlah turis yang melancong alami kenaikan tertinggi. Menurut data dari Badan Pariwisata Dunia Perserikatan Bangsa Bangsa (UNWTO), hingga pertengahan 2017, jumlah turis yang melakukan perjalanan wisata mengalami grafik kenaikan sebanyak 6,4 persen. Kenaikan ini merupakan yang tertinggi dalam sejarah selama tujuh tahun terakhir.

Dari Januari sampai Juni 2017, tercatat ada 598 juta turis yang melancong ke berbagai belahan dunia. Jumlah tersebut naik sebanyak 36 juta dari periode yang sama pada tahun

sebelumnya. Dari ratusan juta turis itu, paling banyak berasal dari Inggris, China, Perancis dan Amerika Serikat. Kepercayaan diri para pelaku usaha wisata disebut menjadi salah satu faktor pendorong semakin banyaknya turis yang bepergian.

<https://lampung.bps.go.id>

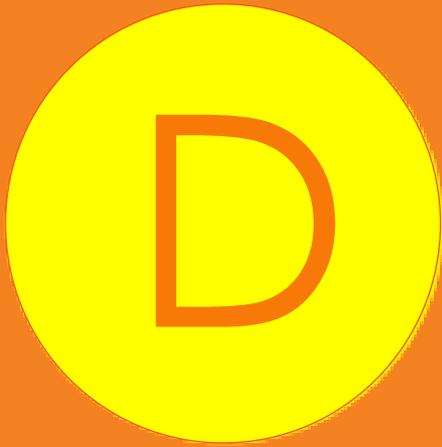
bab 8



Kesimpulan

Kesimpulan

1. Dari hasil Analisis *Overlay*, dengan mengambil wilayah referensi Sumatera, maka diperoleh bahwa terdapat 3 (tiga) kategori unggulan di Provinsi Lampung yaitu kategori Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor (G); Industri Pengolahan (C); dan kategori Informasi dan Komunikasi (J). Tiga kategori tersebut memenuhi kualifikasi sektor ekonomi unggulan dari Analisis *Location Quotient* (LQ) yang berarti mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak dibandingkan wilayah reference Sumatera.
2. Posisi Lampung yang merupakan pintu gerbang menuju Jawa dan Sumatera sangat menguntungkan dalam alur perdagangan antar pulau yang dominan. Dalam sektor ekonomi, Lampung memiliki peluang yang besar dalam memantapkan diri menjadi pusat perdagangan dan jasa pada skala Sumatera bagian Selatan. Sejalan dengan aktivitas ekspor impor dan perdagangan antar pulau, Lampung memiliki peluang untuk menjadi pusat perdagangan hasil pertanian dan industri dari Sumatera bagian Selatan maupun yang didatangkan dari daerah luar.
3. Selain menciptakan nilai tambah, industri pengolahan termasuk andalan untuk penyerapan tenaga kerja. Hal ini terlihat dari kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 2016 Lampung sebesar 18,83 yang berada pada posisi pertama diluar kategori pertanian. Tersedianya sumber daya alam terutama di kategori pertanian yang melimpah menjadikannya sebagai kategori unggulan penyumbang nilai tambah tertinggi provinsi ini. Dengan sumber daya alam yang melimpah tersebut, menjadikan sektor industri pengolahan memiliki potensi besar untuk dikembangkan.
4. Perkembangan teknologi pada saat ini sangat pesat sekali terutama teknologi di bidang informasi komunikasi baik dari sisi kecepatan maupun kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi yang dibutuhkan. Selama kurun waktu 2012-2016, sektor ini memiliki laju pertumbuhan yang selalu positif dan selalu di atas angka delapan persen. Hal ini mencerminkan bahwa nilai PDRB yang dihasilkan Sektor Informasi dan Komunikasi di Provinsi Lampung cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.



Daftar Pustaka

Daftar Pustaka

- Bappeda Provinsi Lampung.2011. Rencana Aksi: Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Lampung 2012-2025, Bandar Lampung: Bappeda.
- Gërkhani, K. (2003). Politico-economic institutions and the informal sector in Albania. (Working Paper; No. 12). Amsterdam: Amsterdam Institute for Advanced labour Studies, University of Amsterdam.
- Hirschman, A.O (1958). The Strategy of Economic Development.: New Haven, Conn: Yale University press.
- Instruksi presiden nomor 6 tahun 2007 tentang percepatan pengembangan sektor Rill dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Marcouiller & Young (2005), "The Black Hole of Graft: The Predatory State and the Informal Economy," American Economic Review 85: 630-46.
- Nurkse, Ragnar. 1953. Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries. New York: Oxford University Press.
- Todaro , M.P and Smith, S.C. (2015). Economic Development 12th ed. New York: Pearson Education
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- World Bank (1994). World development report : Infrastructure for Development, New York: Oxford
- Zen, S.D dan Herman, M. (2007). Pengaruh Harga Saham, Umur Perusahaan, dan Rasio Profitabilitas Perusahaan Terhadap Tindakan Perataan Laba Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta:Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Vol(2): No. 2,



Catatan Teknis

Catatan Teknis

Untuk mendapatkan sektor/kategori unggulan di suatu wilayah ada beberapa tahapan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

Pertama:

Menentukan wilayah analisis (yang menjadi objek analisis) dan wilayah referensi atau wilayah yang lebih besar. Wilayah analisis adalah Provinsi Lampung dan wilayah referensi adalah Pulau Sumatera.

Kedua:

Dilakukan identifikasi sektor yang mungkin dapat dikelompokkan. Hal ini dilakukan karena beberapa data kategori sampai level provinsi dan kabupaten/kota tidak tersedia atau jumlahnya sangat kecil. Oleh sebab itu, terdapat beberapa ketentuan penggabungan data kategori sektoral sebagai berikut:

- Penggabungan sektoral berdasarkan kategori yang sejenis, misalnya D dengan E;

Ketiga:

Proses selanjutnya adalah pengukuran sektor unggulan. Beberapa metode pengukuran yang umum digunakan antara lain:

1. Location Quotient (LQ)

Analisis LQ digunakan untuk menunjukkan besarnya peranan sektor perekonomian suatu wilayah dengan membandingkan sektor yang sama pada wilayah yang lebih besar. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi sektor ekonomi potensial yang menjadi unggulan dan dapat dikembangkan di suatu wilayah. Di samping itu juga digunakan untuk mengidentifikasi keunggulan komparatif (*comparative advantage*) suatu wilayah.

Rumus untuk mendapatkan sektor unggulan di suatu wilayah analisis adalah sebagai berikut:

$$LQ = \frac{S_w/S_a}{S_w/S_r}$$

Keterangan:

S_{ia} : PDRB pada sektor i pada wilayah analisis a

- S_a : PDRB pada wilayah analisis a
 S_{ir} : PDB pada sektor i di wilayah referensi r
 S_r : PDB di wilayah referensi r

Jika berpijak pada data SE2016-L yang menghasilkan indikator jumlah usaha dan jumlah tenaga kerja, maka PDRB pada rumus di atas dapat menggunakan jumlah tenaga kerja. Pengukuran LQ menghasilkan kriteria sebagai berikut:

- Jika $LQ > 1$, sektor i di wilayah analisis a merupakan sektor unggulan, yaitu sektor yang tingkat spesialisasinya lebih tinggi pada wilayah analisis tersebut daripada wilayah referensi.
- Jika $LQ = 1$, sektor i di wilayah analisis a bukan merupakan sektor unggulan, yaitu sektor yang tingkat spesialisasinya sama dengan wilayah referensi.
- Jika $LQ < 1$, sektor i di wilayah analisis a bukan merupakan sektor unggulan, yaitu sektor yang tingkat spesialisasinya lebih rendah daripada wilayah referensi.

2. Analisis Shift-Share

Analisis shift share merupakan salah satu teknik untuk menganalisis data statistik regional, seperti PDRB, tenaga kerja dan lain-lain untuk mengamati struktur perekonomian daerah dan perubahannya secara deskriptif. Caranya dengan menitikberatkan pada pertumbuhan sektor di suatu wilayah dan memproyeksikan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut dengan data yang terbatas (Firdaus, 2007). Analisis ini merupakan salah satu teknik kuantitatif yang biasa digunakan untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi suatu wilayah terhadap struktur ekonomi wilayah administratif yang lebih luas sebagai referensi.

Dalam metode ini terdapat 3 bagian yaitu:

- Regional Share (RS) merupakan komponen share pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh faktor eksternal. RS mengindikasikan adanya peningkatan kegiatan ekonomi daerah akibat kebijakan nasional yang berlaku.
- Proporsional Shift (PS) komponen pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh struktur ekonomi daerah tersebut yang baik, dengan berspesialisasi pada sektor yang pertumbuhannya cepat.

- Differential Shift (DS) merupakan komponen pertumbuhan ekonomi daerah karena kondisi spesifik daerah yang kompetitif. Unsur pertumbuhan ini merupakan keunggulan kompetitif daerah yang dapat mendorong pertumbuhan ekspor daerah.
- Shift Share (SS) merupakan penjumlahan dari Regional Share dengan Proportional Share dan Differential Share.

Jika ingin melihat keunggulan wilayah di suatu wilayah, maka keempat unsur tersebut dirumuskan sebagai berikut:

$$RS_{iz} = y_{iz0} \left(\frac{y_{it}}{y_{r0}} - 1 \right)$$

$$PS_{iz} = y_{iz0} \left(\frac{y_{irt}}{y_{ir0}} - \frac{y_{it}}{y_{r0}} \right)$$

$$DS_{iz} = y_{iz0} \left(\frac{y_{izat}}{y_{iz0}} - \frac{y_{irt}}{y_{ir0}} \right)$$

$$SS_{iz} = RS_{iz} + PS_{iz} + DS_{iz}$$

Keterangan:

y_{ia0}	: PDRB sektor ke-i wilayah analisis periode tahun awal.
y_{rt}	: PDB wilayah referensi periode akhir tahun.
y_{r0}	: PDB wilayah referensi periode awal tahun.
y_{irt}	: PDRB sektor ke-i wilayah referensi periode akhir tahun.
y_{ir0}	: PDRB sektor ke-i wilayah referensi periode awal tahun.
y_{iat}	: PDRB sektor ke-i wilayah analisis periode tahun akhir.
y_{ia0}	: PDRB sektor ke-i wilayah analisis periode tahun awal.

Interpretasi dari hasil pengukuran diatas sebagai berikut:

- Jika $PS_{ia} > 0$, artinya bahwa sektor i pada suatu wilayah analisis tumbuh lebih cepat daripada sektor i di wilayah referensi, dan sebaliknya.
- Jika $DS_{ia} > 0$, artinya bahwa daya saing sektor i pada suatu wilayah analisis lebih tinggi dari daya saing sektor i di wilayah referensi, dan sebaliknya.
- Jika $SS_{ia} > 0$, artinya terjadi penambahan nilai absolut atau mengalami kenaikan

kinerja ekonomi daerah pada sektor i di wilayah analisis tersebut.

Dari ukuran diatas, maka sektor unggulan wilayah adalah sektor-sektor yang mempunyai daya saing yang tinggi. Daya saing suatu sektor menunjukkan potensi yang tinggi untuk dikembangkan.

3. Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

Metode MRP melakukan identifikasi sektor-sektor ekonomi potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan PDRB (*competitive advantage*). MRP membandingkan pertumbuhan suatu sektor pada suatu wilayah terhadap wilayah yang lebih besar, baik dalam skala besar maupun kecil. Pada analisis ini terdapat dua rasio pertumbuhan yang bisa dihitung yaitu: rasio pertumbuhan wilayah studi (RPs), dan rasio wilayah referensi (RPr). Jika ingin melihat sektor unggulan suatu pulau, rumusnya adalah sebagai berikut:

$$RP_{ia} = \frac{(y_{iat}/y_{ia0}) - 1}{(y_{at}/y_{a0}) - 1}$$

$$RP_{ir} = \frac{(y_{irt}/y_{ir0}) - 1}{(y_{rt}/y_{r0}) - 1}$$

Keterangan:

- y_{iat} : PDRB sektor i wilayah analisis ke a pada periode tahun akhir.
- y_{ia0} : PDRB sektor i wilayah analisis ke a pada periode tahun awal.
- y_{at} : PDRB total wilayah analisis ke a pada periode tahun akhir.
- y_{a0} : PDRB total wilayah analisis a pada periode tahun awal.
- y_{irt} : PDB sektor i wilayah referensi pada periode tahun akhir.
- y_{ir0} : PDR sektor i wilayah referensi pada periode tahun awal.
- y_{rt} : PDB wilayah referensi pada periode tahun akhir.
- y_{r0} : PDB wilayah referensi pada periode tahun awal.

MRP hanya memperhitungkan pertumbuhan sektor, tanpa melihat kontribusi suatu sektor di dalam suatu wilayah. Berikut interpretasi hasilnya:

- Jika nilai RP_{ia} positif dan RP_{ir} positif maka pertumbuhan sektor i di wilayah analisis dan wilayah referensi sama-sama tinggi. Dapat diartikan sektor tersebut

merupakan potensi baik di tingkat regional maupun global (di level wilayah referensinya)

- Jika nilai RP_{ia} positif dan RP_{ir} negatif maka pertumbuhan sektor i di wilayah analisis lebih tinggi dari wilayah referensi. Dapat diartikan sektor tersebut merupakan potensi di tingkat regional namun secara global tidak berpotensi
- Jika nilai RP_{ia} negatif dan RP_{ir} positif maka pertumbuhan sektor i di wilayah analisis lebih rendah dari wilayah referensi. Dapat diartikan sektor tersebut merupakan potensi di tingkat global namun secara regional tidak berpotensi.
- Jika nilai RP_{ia} negatif dan RP_{ir} negatif maka pertumbuhan sektor i di wilayah analisis dan wilayah referensi sama-sama rendah. Dapat diartikan sektor tersebut tidak berpotensi baik di tingkat regional maupun global (wilayah referensi)

4. Tipologi Klassen

Tipologi Klassen mendasarkan pengelompokkan suatu sektor di suatu wilayah dengan cara membandingkan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut dengan pertumbuhan ekonomi wilayah yang lebih luas dan membandingkan pangsa sektor tersebut dengan nilai rata-ratanya di tingkat yang lebih luas. Hasil analisis Tipologi Klassen akan menunjukkan posisi pertumbuhan dan pangsa sektor tersebut dalam membentuk perekonomian di suatu wilayah.

Untuk melihat potensi ekonomi di suatu wilayah digunakan pendekatan pertumbuhan sektoral dan kontribusinya terhadap perekonomian di suatu wilayah. Untuk pengukuran sektor potensial pada analisis ini menggunakan data PDB/PDRB harga konstan untuk pertumbuhan, PDB/PDRB atas dasar harga berlaku untuk kontribusi. Melalui metode ini diperoleh empat karakteristik pola dan struktur pertumbuhan dari sektor ekonomi yang berbeda, yaitu: sektor unggulan dan tumbuh pesat, sektor unggulan tapi pertumbuhannya tertekan, sektor potensial yang berkembang cepat, dan sektor yang tidak potensial. Adapun matriks untuk menentukan tipe karakteristik untuk melihat sektor unggulan di tingkat wilayah analisis adalah sebagai berikut:

Kontribusi Sektoral	Pertumbuhan Sektoral	
	$G_{ia} \geq G_{ir}$	$G_{ia} < G_{ir}$
$S_{ia} \geq S_{ir}$	Sektor unggulan dan tumbuh pesat	Sektor unggulan tetapi pertumbuhannya tertekan
$S_{ia} < S_{ir}$	Sektor potensial dan masih dapat dikembangkan	Bukan sektor potensial dan tertinggal

Keterangan:

G_{ia} : Pertumbuhan PDRB sektor i di wilayah analisis

G_{ir} : Pertumbuhan PDB/PDRB sektor i di wilayah referensi

S_{ia} : Kontribusi PDRB sektor i di wilayah analisis

S_{ir} : Kontribusi PDB/PDRB sektor i di wilayah referensi

Lampiran

Lampiran 1.

Banyaknya Usaha/Perusahaan menurut Provinsi se-Sumatera dan Kategori Lapangan Usaha

Kategori	Provinsi										
	Aceh	Sumatera Utara	Sumatera Barat	Riau	Jambi	Sumatera Selatan	Bengkulu	Lampung	Babel	Kep. Riau	Sumatera
B	1.679	3.498	6.507	1.402	4.042	2.510	1.521	1.230	12.246	569	35.204
C	87.244	126.991	87.393	47.585	30.309	75.137	22.959	89.276	15.974	18.568	601.436
D,E	1.266	6.087	1.863	3.077	1.443	2.678	949	3.009	486	1.383	22.241
F	6.345	9.895	5.866	5.531	3.695	7.550	2.685	8.263	1.405	1.920	53.155
G	193.981	556.139	269.781	274.267	169.678	338.249	105.674	450.062	55.146	65.203	2.478.180
H	18.705	71.486	26.005	10.920	13.731	42.261	8.199	29.331	2.485	6.002	229.125
I	67.476	233.852	114.620	97.309	48.535	94.320	26.752	94.902	18.365	35.118	831.249
J	7.299	28.919	13.762	12.090	7.634	16.232	6.027	23.374	2.962	3.459	121.758
K	1.955	5.944	4.179	3.418	1.956	2.823	1.598	3.698	821	1.299	27.691
L	4.824	17.022	12.355	16.474	6.338	12.141	5.726	8.030	5.653	3.504	92.067
M,N	6.348	15.436	9.399	8.607	4.337	9.167	3.019	11.480	2.065	3.506	73.364
P	15.355	30.492	15.832	16.371	9.858	16.465	5.052	18.832	3.537	4.800	136.594
Q	6.502	16.452	7.681	7.701	4.674	8.703	2.907	8.598	1.575	2.703	67.496
R,S,U	13.840	56.063	17.838	21.995	10.793	29.328	6.936	33.201	4.705	7.474	202.173
Total	432.819	1.178.276	593.081	526.747	317.023	657.564	200.004	783.286	127.425	155.508	4.971.733

Lampiran 2. Banyaknya Tenaga Kerja menurut Provinsi se-Sumatera dan Kategori Lapangan Usaha

Kategori	Provinsi										
	Aceh	Sumatera Utara	Sumatera Barat	Riau	Jambi	Sumatera Selatan	Bengkulu	Lampung	Babel	Kep. Riau	Sumatera
B	5.154	9.041	20.013	14.768	13.745	54.326	4.262	9.858	73.939	16.341	221.447
C	167.355	440.418	186.735	204.289	82.998	201.765	47.335	270.137	37.369	188.269	1.826.670
D,E	6.933	24.300	9.423	8.605	5.711	13.832	2.655	8.838	3.342	6.245	89.884
F	61.454	119.738	67.476	91.698	34.455	86.912	22.115	63.449	13.021	39.515	599.833
G	300.930	986.207	422.004	493.112	278.101	866.067	168.760	707.331	94.429	143.580	4.460.521
H	25.272	135.399	36.578	29.064	23.639	85.968	11.516	44.165	6.225	21.565	419.391
I	112.144	412.658	183.044	177.815	80.429	283.103	42.345	150.450	32.759	83.722	1.558.469
J	11.739	50.276	20.271	22.777	11.871	49.873	9.236	32.129	5.097	7.530	220.799
K	23.350	76.605	39.019	35.985	21.655	39.769	12.925	34.081	8.584	15.938	307.911
L	5.832	26.847	14.377	21.761	8.115	16.698	6.701	10.086	6.800	8.740	125.957
M,N	16.920	55.607	25.570	37.733	18.327	40.807	8.389	29.794	5.655	26.686	265.488
P	191.493	343.241	159.825	178.057	95.428	203.841	56.754	196.686	32.870	44.167	1.502.362
Q	60.896	82.600	36.304	39.081	22.898	62.884	16.191	42.364	10.196	19.467	392.881
R,S,U	24.837	100.502	28.694	42.777	19.781	94.390	14.184	56.448	8.823	20.360	410.796
Total	1.014.309	2.863.439	1.249.333	1.397.522	717.153	2.100.235	423.368	1.655.816	339.109	642.125	12.402.409

Lampiran 3.

Banyaknya Usaha/Perusahaan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dan Kategori Lapangan Usaha

Kategori	Kabupaten/Kota																Provinsi Lampung
	Lampung Barat	Tanggamus	Lampung Selatan	Lampung Timur	Lampung Tengah	Lampung Utara	Way Kanan	Tulang Bawang	Pesawaran	Pringsewu	Mesuji	Tulang Bawang Barat	Pesisir Barat	Bandar Lampung	Metro		
B	46	58	62	209	302	53	119	33	58	29	-	25	77	159	-	1.230	
C	1.547	5.341	9.325	18.270	14.472	4.061	2.925	2.963	4.441	9.540	1.553	2.060	1.025	8.985	2.768	89.276	
D/E	60	114	392	132	185	323	83	113	87	113	52	40	17	983	315	3.009	
F	281	315	618	614	814	493	463	117	199	401	76	131	199	3.328	214	8.263	
G	15.920	32.982	49.103	64.832	66.873	34.444	24.270	20.385	26.265	21.022	10.170	12.752	6.525	53.216	11.303	450.062	
H	1.094	2.741	3.301	3.260	3.999	2.098	970	622	1.618	1.192	239	630	698	6.160	709	29.331	
I	2.148	3.923	9.990	10.366	12.968	6.357	3.714	4.459	3.662	3.786	2.322	2.760	1.107	23.236	4.104	94.902	
J	504	1.567	2.623	3.703	2.900	1.973	1.084	953	1.299	743	560	482	132	3.994	857	23.374	
K	111	114	402	500	606	292	93	226	76	190	86	121	22	680	179	3.698	
L	182	165	669	323	571	391	153	807	201	270	69	155	40	3.294	740	8.030	
M,N	388	432	1.127	1.475	1.794	664	368	470	474	596	226	374	98	2.515	479	11.480	
P	912	1.232	1.902	2.343	2.704	1.668	1.007	876	1.016	847	461	536	307	2.510	511	18.832	
Q	386	456	828	1.254	1.567	676	399	533	432	316	286	321	150	785	209	8.598	
R,S,U	906	1.320	3.082	3.763	5.122	1.658	950	1.455	1.560	1.470	478	824	444	8.701	1.468	33.201	
Total	24.485	50.760	83.424	111.044	114.877	55.151	36.598	34.012	41.388	40.515	16.578	21.211	10.841	118.546	23.856	783.286	

Lampiran 4. Banyaknya Tenaga Kerja menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dan Kategori Lapangan Usaha

Kategori	Kabupaten/Kota														Provinsi Lampung	
	Lampung Barat	Tanggamus	Lampung Selatan	Lampung Timur	Lampung Tengah	Lampung Utara	Way Kanan	Tulang Bawang	Tulang Pesawaran	Pringsewu	Mesuji	Tulang Bawang Barat	Pesisir Barat	Bandar Lampung		Metro
B	194	1.424	391	2.030	2.145	547	331	341	534	193	-	121	504	1.103	-	9.858
C	2.595	8.968	36.561	39.102	64.641	11.716	9.539	11.756	11.156	20.793	3.846	6.312	2.057	34.889	6.206	270.137
D,E	151	471	1.510	588	370	542	118	367	242	185	84	48	58	3.358	746	8.838
F	1.737	1.866	6.026	4.159	4.897	4.119	2.664	800	1.440	2.191	475	1.048	1.094	28.661	2.272	63.449
G	23.512	47.182	74.768	96.787	102.458	54.607	35.669	31.648	37.607	32.505	15.425	18.422	10.905	105.875	19.961	707.331
H	1.294	3.204	4.736	5.170	5.920	2.934	1.384	1.049	1.781	1.656	322	793	928	12.039	955	44.165
I	3.001	5.418	15.388	15.092	19.768	9.744	5.402	6.762	5.101	6.219	3.432	3.877	2.022	42.304	6.920	150.450
J	661	1.979	3.709	4.765	3.906	2.742	1.319	1.270	1.602	983	662	625	216	6.306	1.384	32.129
K	718	892	2.561	3.301	4.776	1.579	612	1.597	478	1.868	369	725	139	11.631	2.835	34.081
L	206	247	795	370	699	431	160	894	243	309	72	161	64	4.536	899	10.086
M,N	716	901	3.053	3.396	4.245	1.715	746	1.086	1.055	1.396	436	828	202	8.745	1.274	29.794
P	8.284	11.709	19.177	23.813	29.612	17.756	10.338	9.056	9.612	10.159	4.538	5.669	3.353	26.036	7.574	196.686
Q	1.646	1.748	3.528	4.028	6.030	3.812	1.183	2.267	1.824	2.478	1.399	1.005	477	8.194	2.745	42.364
R,S,U	1.360	2.081	5.133	6.245	9.376	2.566	1.481	2.125	2.912	2.598	672	1.315	634	15.545	2.405	56.448
Total	46.075	88.090	177.336	208.846	258.843	114.810	70.946	71.018	75.587	83.533	31.732	40.949	22.653	309.222	56.176	1.655.816

Lampiran 5.

PDRB atas dasar harga berlaku menurut Lapangan Usaha Provinsi Lampung (juta rupiah), 2010-2016

Kategori	Tahun						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A	52.038.768	58.959.005	63.343.919	67.774.669	75.443.599	80.517.050	88.413.049
B	8.890.079	10.258.207	11.272.442	13.069.360	14.515.052	14.362.319	15.337.000
C	25.860.879	29.141.277	32.809.031	36.081.678	41.611.706	48.746.061	52.940.736
D	129.492	129.157	130.294	126.236	158.468	202.061	306.236
E	167.955	182.188	194.383	198.252	235.239	267.840	289.013
F	13.558.460	14.883.879	16.532.645	17.848.072	20.561.022	21.488.618	24.511.781
G	18.389.730	20.591.947	21.911.833	23.164.362	25.435.187	27.473.777	31.351.925
H	6.346.849	6.901.020	7.742.100	9.169.874	10.737.723	13.031.149	14.875.359
I	1.782.207	2.179.093	2.531.152	2.851.517	3.354.435	3.820.329	4.383.562
J	5.003.091	5.704.050	6.627.734	7.245.353	7.980.825	8.978.433	10.733.434
K	2.889.662	3.508.525	4.277.304	4.832.132	5.160.746	5.576.703	6.220.548
L	4.159.648	4.741.500	5.175.205	5.588.980	6.540.048	7.259.563	8.217.368
M,N	165.561	206.731	245.350	290.527	348.028	401.621	454.978
O	4.911.270	5.207.975	6.099.581	6.842.596	8.181.048	9.344.390	9.952.877
P	3.621.675	4.460.877	5.191.519	5.797.983	6.551.072	7.090.519	7.893.998
Q	1.317.212	1.541.856	1.744.985	1.904.552	2.126.188	2.465.790	2.771.719
R,S,U	1.328.304	1.449.510	1.519.339	1.616.496	1.854.064	2.198.973	2.459.556
Total	150.560.842	170.046.794	187.348.817	204.402.639	230.794.450	253.225.194	281.113.139

Lampiran 6.
PDRB atas dasar harga konstan menurut Lapangan Usaha Provinsi Lampung (juta rupiah), 2010-2016

Kategori	Tahun									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
A	52.038.768	54.841.031	56.997.473	59.636.488	61.595.154	63.718.622	65.730.287			
B	8.890.079	9.757.014	10.303.929	11.485.799	11.592.348	12.079.303	12.606.478			
C	25.860.879	27.146.427	29.677.129	31.973.935	33.388.068	35.913.821	37.312.085			
D	129.492	140.403	161.678	179.191	210.872	220.012	269.487			
E	167.955	176.578	185.094	182.184	195.830	200.670	207.840			
F	13.558.460	14.336.717	15.259.753	15.806.448	17.023.886	17.473.158	18.963.099			
G	18.389.730	19.776.845	20.813.161	21.431.655	22.860.083	23.294.481	24.843.322			
H	6.346.849	6.867.518	7.578.030	8.135.379	8.759.020	9.794.991	10.566.312			
I	1.782.207	1.936.230	2.119.584	2.242.990	2.416.469	2.632.962	2.813.166			
J	5.003.091	5.620.479	6.372.264	6.969.232	7.584.986	8.406.949	9.300.228			
K	2.889.662	3.304.942	3.691.723	3.940.431	4.004.968	4.143.424	4.475.527			
L	4.159.648	4.451.859	4.820.946	5.301.396	5.709.667	5.966.147	6.427.268			
M,N	165.561	191.611	218.240	244.412	264.092	285.428	297.387			
O	4.911.270	4.968.668	5.274.721	5.406.076	5.850.912	6.423.699	6.457.059			
P	3.621.675	4.116.944	4.302.017	4.526.263	4.977.312	5.361.599	5.723.370			
Q	1.317.212	1.414.398	1.578.688	1.694.907	1.781.589	1.903.919	2.020.871			
R,S,U	1.328.304	1.389.838	1.414.777	1.463.224	1.582.235	1.716.916	1.793.397			
Total	150.560.842	160.437.501	170.769.207	180.620.008	189.797.491	199.536.099	209.807.186			

Lampiran 7.

Distribusi dan Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha Provinsi Lampung (persen), 2010-2016

Kategori	Distribusi						Pertumbuhan							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
A	34,56	34,67	33,81	33,16	32,69	31,80	31,45	3,84	5,38	3,93	4,63	3,28	3,45	3,16
B	5,90	6,03	6,02	6,39	6,29	5,67	5,46	(1,60)	9,75	5,61	11,47	0,93	4,20	4,36
C	17,18	17,14	17,51	17,65	18,03	19,25	18,83	4,60	4,97	9,32	7,74	4,42	7,56	3,89
D	0,09	0,08	0,07	0,06	0,07	0,08	0,11	7,51	8,43	15,15	10,83	17,68	4,33	22,49
E	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,11	0,10	10,35	5,13	4,82	(1,57)	7,49	2,47	3,57
F	9,01	8,75	8,82	8,73	8,91	8,49	8,72	6,20	5,74	6,44	3,58	7,70	2,64	8,53
G	12,21	12,11	11,70	11,33	11,02	10,85	11,15	8,40	7,54	5,24	2,97	6,67	1,90	6,65
H	4,22	4,06	4,13	4,49	4,65	5,15	5,29	8,38	8,20	10,35	7,35	7,67	11,83	7,87
I	1,18	1,28	1,35	1,40	1,45	1,51	1,56	8,60	8,64	9,47	5,82	7,73	8,96	6,84
J	3,32	3,35	3,54	3,54	3,46	3,55	3,82	20,78	12,34	13,38	9,37	8,84	10,84	10,63
K	1,92	2,06	2,28	2,36	2,24	2,20	2,21	9,36	14,37	11,70	6,74	1,64	3,46	8,02
L	2,76	2,79	2,76	2,73	2,83	2,87	2,92	13,12	7,02	8,29	9,97	7,70	4,49	7,73
M,N	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	0,16	0,16	14,10	15,73	13,90	11,99	8,05	8,08	4,19
O	3,26	3,06	3,26	3,35	3,54	3,69	3,54	5,25	1,17	6,16	2,49	8,23	9,79	0,52
P	2,41	2,62	2,77	2,84	2,84	2,80	2,81	13,74	13,68	4,50	5,21	9,97	7,72	6,75
Q	0,87	0,91	0,93	0,93	0,92	0,97	0,99	6,17	7,38	11,62	7,36	5,11	6,87	6,14
R,S,U	0,88	0,85	0,81	0,79	0,80	0,87	0,87	9,00	4,63	1,79	3,42	8,13	8,51	4,45
Total	100	100	100	100	100	100	100	5,81	6,56	6,44	5,77	5,08	5,13	5,15

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://lampungbps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI LAMPUNG**

